

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2005-2009**



Skripsi

*Dimaksudkan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*

oleh :

ERNAWATI

F 1108506

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011**

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

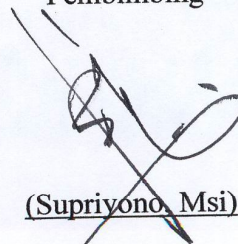
Skripsi dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2005-2009**

Surakarta, Januari 2011

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



(Supriyono, Msi)

NIP. 19600221 198601 1001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Surakarta, 21 Juni 2011

DR.Guntur Riyanto, MSi

sebagai Ketua

()

NIP. 19580927 198601 1001

Drs. Supriyono, Msi


sebagai Pembimbing

()

NIP. 19600221 198601 1001

Drs. Sutanto, Msi

sebagai Anggota

()

NIP. 19561129 198601 1001

MOTTO

“Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan *bismillahirrahmanirrahim* adalah terputus”

(Tafsir Ibnu Khasir)

“Sesungguhnya Setelah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu Telah Selesai *(Dari Sesuatu Urusan)*, Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh *(Urusan)* Yang Lain, dan Hanya Kepada Tuhan Mu Lah Hendaknya Kamu Berharap”

(An Nahl: 6-8)

Tiada hal yang dapat diraih tanpa suatu pengorbanan, sebab dalam meraih keberhasilan membutuhkan waktu & tahapan yang harus kita lewati.

Mantapkanlah hatimu sebelum kamu berkata “iya”, karena konsekuensi atas satu kata itu seringkali jauh lebih berat daripada saat kamu berkata “tidak”

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (AlMujadilah : 11)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

- ♥ Bapak dan Ibuku tercinta
- ♥ Nenekku Tersayang
- ♥ Keluarga besar di Sragen
- ♥ Saudara-saudaraku dan Sahabat-sahabatku di Solo, Gemolong dan di Indonesia
- ♥ Almamaterku UNS

commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan nikmat-Nya, hal-hal yang baik dapat terlaksana, yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Syukur alhamdulillah dengan ijin bimbingan, pertolongan, dan kasih sayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional Di Indonesia Tahun 2005-2009*”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ketulusan yang mendalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Supriyono, M.Si, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi UNS.
3. Bapak Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi UNS.

commit to user

4. Ibu Dra. Izza Mafruhah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi UNS.
5. Ibu Dwi Prasetyani, SE, Msi., selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi UNS.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pelayanan kepada penulis.
7. Bapak, Ibuku yang selalu tulus mendoakan, memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis.
8. Keluarga besar di Gemolong yang senantiasa selalu mendoakan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatQu Mitha, Maya dan Mifta terimakasih atas semua kebersamaannya selama ini. Maaf lho banyak ngrepotin dan Makasih banget atas semuanya. Sukses buat masa depan kita. Amiiiiiiin....
10. Mas Dedy guru besarku, terimakasih atas nasehat-nasehatnya selama ini baik dalam kehidupan dan skripsi ini. Hehehe,, yen ndoling ngajak2 aku maneh y..!
11. Teman seperjuangan Ajeng, Mitha, Umi terimakasih atas saran, kritik dan nasehat-nasehatnya hingga tersusunnya skripsi ini. Ayoooo yang semangat ngerjain skripsinya.....
12. Teman-teman di Ekonomi Pembangunan 2008, Heri, Anggit , Galih dan semuanya terimakasih atas hari-hari terindah bersama kalian. “Teruskan Perjuangan Kaliaaaaaan.... karena kekuatan terbesar dalam meraih mimpi adalah Yakin”.

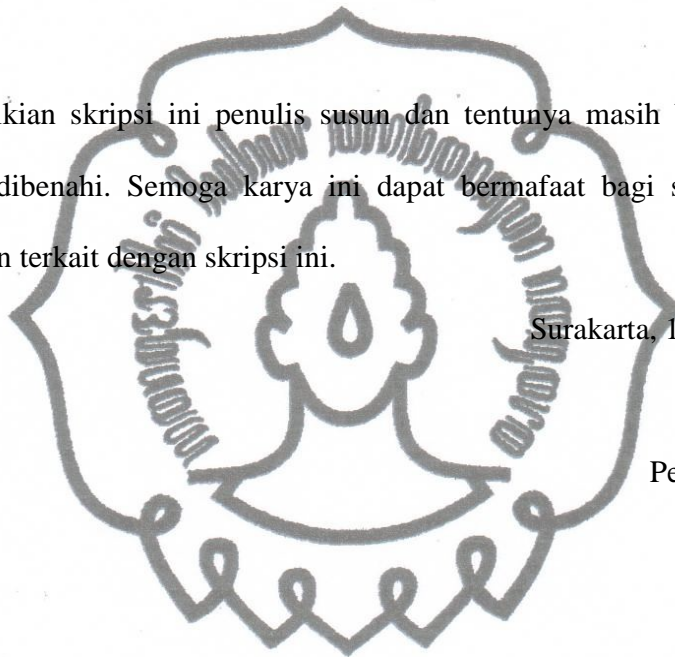
13. Temanku Yudha terimakasih yang telah mengajari aku pengolahan data hingga tersusun skripsi ini, semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap langkah kita

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak atas bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini.

Surakarta, 12 Januari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TEORI	15
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	15
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	15
b. Teori Umum Pertumbuhan Ekonomi	16

commit to user

2. Kemiskinan	21
a. Definisi Kemiskinan	21
b. Ukuran Kemiskinan	25
c. Kriteria Kemiskinan.....	28
d. Penyebab Kemiskinan	30
e. Mengukur Distribusi Pendapatan	34
B. Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan..	36
1. Penanaman Modal Asing (PMA)	36
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	41
3. Angka Harapan Hidup	43
4. Angka Melek Huruf	44
5. Konsumsi Makanan	45
6. Pengeluaran Pemerintah	50
C. Penelitian Terdahulu	54
D. Kerangka Pemikiran	58
E. Hipotesis Penelitian	58
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	62
B. Ruang Lingkup Penelitian	62
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	63
D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	63
E. Definisi Operasional Variabel.....	64
F. Metode Analisis Data	65

1. Uji Asumsi Klasik	68
a. Uji Multikolinearitas	68
b. Uji Autokorelasi	69
c. Uji Heteroskedastisitas	70
2. Uji Statistik	71
a. Uji F (Uji Secara Bersama-sama)	71
b. Uji t (Uji Secara Individu)	72
c. Koefisien Determinasi (R^2)	74
BAB IV DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Penelitian	75
1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	75
2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia	78
a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008 dan Maret 2009	78
b. Upaya Penanggulangan Kemiskinan	79
3. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia	86
4. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia	89
5. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Indonesia	91
6. Perkembangan Angka Melek Huruf di Indonesia	92
7. Perkembangan Konsumsi Makanan di Indonesia	94
8. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia	96
B. Analisis Data dan Pembahasan	98
1. Diskripsi Data	98
2. Diskripsi Statistik	101

commit to user

3. Hasil Analisis Data.....	102
4. Uji Asumsi Klasik	106
a. Uji Multikolinearitas	106
b. Uji Autokorelasi	107
c. Uji Heteroskedastisitas	107
5. Uji Statistik	108
a. Uji F (Uji Secara Bersama-sama)	108
b. Uji t (Uji Secara Individu)	109
c. Koefisien Determinasi (R^2)	113
C. Interpretasi Hasil Secara Ekonomi	113
1. Nilai Konstanta terhadap Pertumbuhan Ekonomi	113
2. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan	113
3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Kemiskinan	115
4. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan	116
5. Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Kemiskinan	118
6. Pengaruh Konsumsi Makanan terhadap Kemiskinan	119
7. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan	120
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user

DAFTAR TABEL

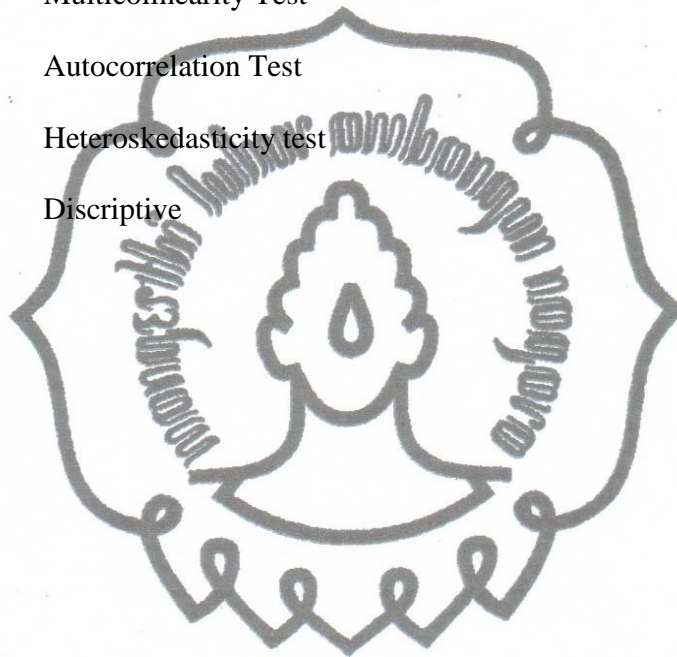
TABEL	Halaman
1.1 PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2005-2009 (Triliunrupiah).....	4
I.2 Perkembangan Realisasi Investasi, 1990 - 31 Desember 2009.....	5
I.3 Realisasi Belanja Negara 2004-2009 (Rp Miliar)	12
IV.1 Descriptive Statistic	101
IV.2 Hasil Estimasi Linier Berganda	104
IV.3 Hasil Uji <i>Multikolinieritas</i>	106
IV.4 Hasil Uji <i>Autokorelasi</i>	107
IV.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	108
IV.7 Hasil uji t	110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
I.1 Lingkaran Virtuouse hubungan antara pertumbuhan, lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.....	8
II.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>vicious circle of poverty</i>)	31
II.2. Kurva Lorentz dan Garis Pemerataan Pendapatan	36
II.3. Kerangka Pemikiran	60
III.1. Statistik Uji F	71
III.2. Statistik Uji t	72
IV.1. Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996–2009	79
IV.2 Perkembangan Realisasi PMA di Indonesia 1990 –2009	88
IV.3 Perkembangan Realisasi PMDN di Indonesia 1990 –2009	91
IV.5 Perkembangan Angka Harapan Hidup Indonesia Tahun 2005-2009	92
IV.6. Angka Melek Huruf Indonesia Tahun 2004-2009	94
IV.7 Perkembangan Konsumsi Makanan Indonesia Tahun 2004-2009	96
IV.8 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2000-2009	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Perkembangan Variabel Pada Tahun 2005-2009
- Lampiran 2 Tabel Analisis Regresi Berganda (Linier)
- Lampiran 3 Multicolinearity Test
- Lampiran 4 Autocorrelation Test
- Lampiran 5 Heteroskedasticity test
- Lampiran 6 Discriptive



ABSTRAKSI**ERNAWATI****F1108506****ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN NASIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2005-2009**

Penelitian ini mengambil judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional Di Indonesia Tahun 2005-2009". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2009.

Hasil Penelitian menunjukkan variabel PMA, angka melek huruf dan konsumsi makanan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan pada signifikansi 5%. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan pada signifikansi 5%. Pada variabel PMDN dan angka harapan hidup tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil uji F atau uji secara bersama-sama, semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pemilihan variabel sudah tepat, karena R^2 yang dihasilkannya 0,506 hampir mencapai angka 1.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain: (*Pertama*) Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) hendaknya Pemerintah membuat undang-undang baru tentang Penanaman Modal Asing sehingga lebih banyak investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.. (*Kedua*) Melihat begitu besarnya pengaruh angka melek huruf (AMH) dalam hal penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional maka sudah sepantasnya Pemerintah melakukan usaha atau langkah-langkah guna peningkatan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Jika sekarang pemerintah menggerakkan program wajib belajar 9 tahun maka sudah seharusnya pemerintah meningkatkan upaya sekolah gratis wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak yang kurang mampu sehingga masalah buta huruf di Indonesia cepat terselesaikan..(*Ketiga*) sepantasnya Pemerintah melakukan usaha atau langkah-langkah guna peningkatan konsumsi makanan terhadap penduduk Indonesia seperti lebih meningkatkan pasokan kebutuhan pokok terutama makanan agar tidak terjadi lonjakan harga sembako di masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. (*Keempat*) seharusnya pemerintah lebih selektif dalam pengeluaran dana untuk membantu masyarakat miskin sehingga bantuan tidak jatuh ditangan orang yang tidak tepat dan pengeluaran pemerintah dapat terealisasi secara merata.

**Kata Kunci : PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf,
konsumsi makanan, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan.**

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mempelajari perilaku produksi adalah untuk memperkirakan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi input faktor utama, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pendekatan ini, dipelopori oleh Solow (1956,1957), adalah sebuah kerangka kerja akuntansi berdasarkan data aktual untuk output, modal, dan tenaga kerja. Pada dasarnya, ia berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa proporsi pertumbuhan ekonomi tercatat bisa dihubungkan ke pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan perubahan dalam efisiensi keseluruhan atau total faktor produktivitas.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentu saja mempunyai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat taraf hidup masyarakat (sesuai Undang-Undang Dasar 45 alenia IV). Maka pembangunan perekonomian harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara maksimal. Setiap pembangunan walaupun sekecil apapun pasti memerlukan dana apalagi membangun perekonomian negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa lebih. Terdapat beberapa sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri (Suparmoko,1992:94-95).

1. Pendapatan pajak, adalah iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung.
2. Retribusi, adalah pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dimana terdapat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembiayaan retribusi tersebut.
3. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Sumber pendanaan dari luar negeri, adalah bantuan atau hibah yang diperoleh dari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan suatu negara dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan penduduk, menjadi tolok ukur kemapanan suatu negara. Mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang merupakan upaya untuk lebih mengejar ketertinggalan

dengan negara lain serta dapat lebih mensejajarkan diri dengan negara-negara yang lebih maju. Namun, sebagian besar negara berkembang mengalami hambatan terutama dalam hal dana untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.

Krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik atau yang lebih dikenal dengan krisis multidimensi menyebabkan perekonomian semakin terpuruk. Perekonomian Indonesia yang tertinggal mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengusahakan bantuan luar negeri, misalnya dalam bentuk pinjaman atau hutang luar negeri. Sumber dana eksternal dimanfaatkan oleh negara berkembang (Indonesia) sebagai dana tambahan di samping tabungan domestik. Selain melalui pinjaman luar negeri pemerintah juga menggalakkan masuknya investasi, baik itu investasi dari dalam negeri maupun investasi swasta asing. Penanaman modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang sebagai suatu dasar yang signifikan untuk memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan perubahan dan perombakan yang substantial dalam struktur produksi dan perdagangan modal asing berperan penting dalam mobilisasi sumber dana transformasi struktural, yang terakhir modal asing akan menjadi menurun segera setelah perubahan struktural terjadi. Selama ini, realisasi penanaman modal asing di Indonesia masih relatif kecil. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam

commit to user

mendorong realisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan investasi dalam negeri (Cyrillus, 2002:6)

Sebagai penganut ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional juga berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan. Perdagangan internasional merupakan *engine of economic growth* karena memberikan manfaat yang besar berupa nilai tambah dari keuntungan komparatif perdagangan internasional. Namun, di sisi lain, peningkatan ekspor ternyata belum dapat memastikan terbentuknya tatanan industrial yang beragam di negara-negara berkembang. Hal ini akibat timpangnya harga bahan baku (alam) dan produk industri. Suatu hal yang sulit bagi negara untuk mencapai industrialisasi yang dibiayai dari ekspor sumber daya alam (Ivant, 1999).

Tabel I.1
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2005-2009 (Triliun rupiah)

Jenis Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.785,6	2.092,7	2.510,5	3.000,0	3.290,8	1.043,8	1.076,9	1.130,8	1.191,2	1.249,
2. Konsumsi Pemerintah	225,0	288,1	329,8	416,9	539,8	134,6	147,6	153,3	169,3	195,9
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	655,9	805,8	985,6	1.370,6	1.743,7	3393,5	403,7	441,4	493,7	510,1
4. a. Perubahan Investori	40,0	42,4	-1,1	5,8	-5,5	33,5	29,0	-0,2	2,1	-0,5
b. Diskrepansi Statistik	-47,2	-70,5	-33,6	105,9	-112,4	-8,5	16,2	54,2	27,0	-1,0
5. Ekspor	945,1	1.036,3	1.163,0	1.475,1	1.354,2	793,6	868,3	942,4	1.032,3	932,1
6. Dikurangi: Impor	830,1	855,6	1.003,3	1.422,9	1.197,2	639,7	694,6	757,6	833,3	708,6
PDB	2774,3	3.339,2	3.950,9	4.9513,4	5.613,4	1.750,8	1.847,1	1.964,3	2.082,3	2.177,

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan domestik bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya. Borensztein, De Gregorio, dan Lee (1998) menyatakan bahwa investasi langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*) memiliki pertumbuhan efek positif ketika negara tersebut memiliki tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yang memungkinkan untuk mengeksploitasi FDI.

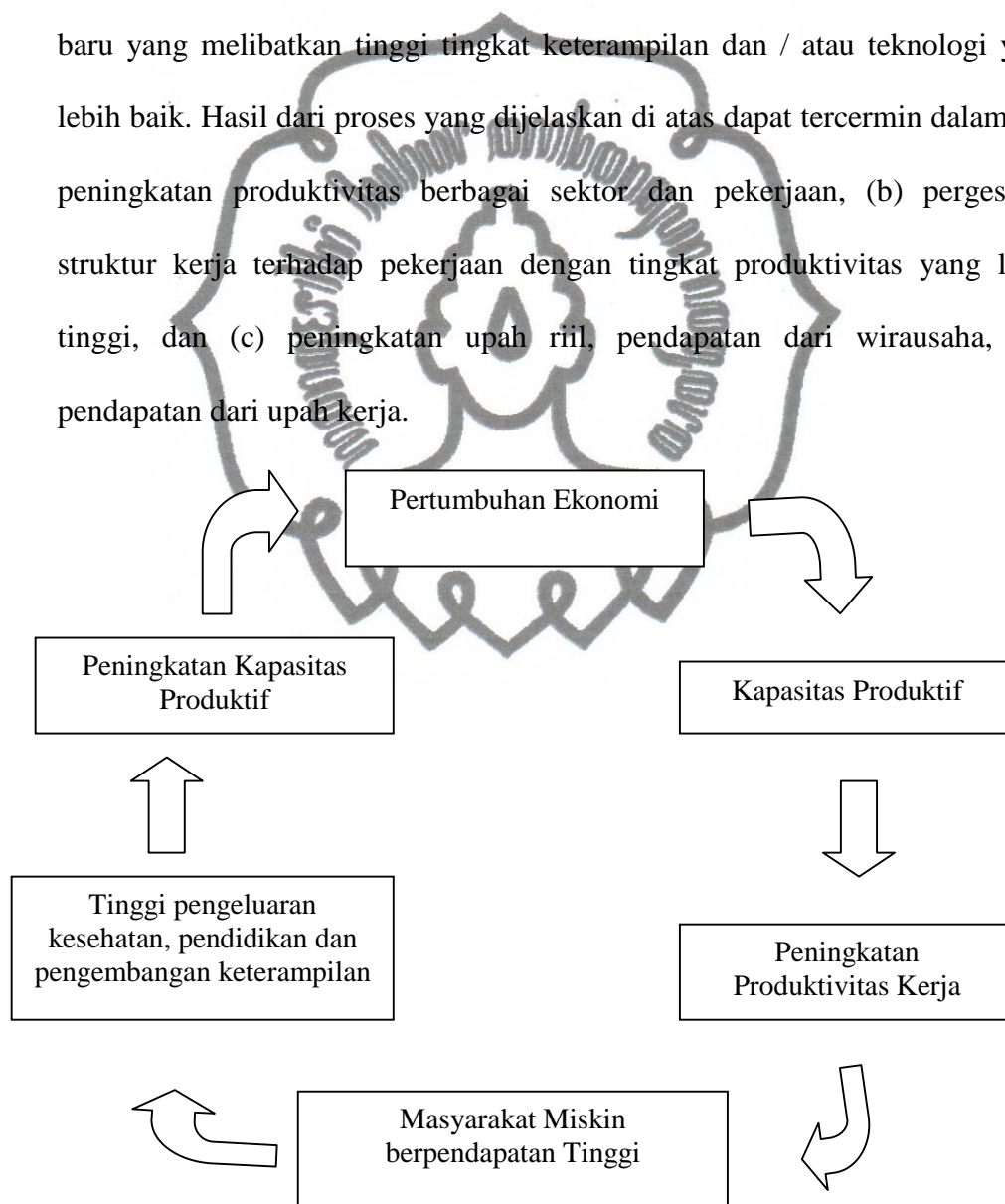
Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai

akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Secara konseptual, hubungan antara output, pertumbuhan kesempatan kerja dan kemiskinan dapat dianalisis di tingkat makro dan mikro. Pada tingkat makro, hubungan antara kemiskinan di dimensi pendapatan dan pertumbuhan output dapat dikonseptualisasikan dalam hal rata-rata produktivitas tenaga kerja yang digunakan yang pada gilirannya akan tercermin dalam rendahnya tingkat nyata upah dan rendahnya tingkat penghasilan di kerja mandiri. Pada tingkat mikro dari sebuah rumah tangga, hubungan yang sama antara kemiskinan dan lapangan kerja beroperasi melalui jenis dan rendah produktivitas kegiatan ekonomi dimana pendapatan anggota rumah tangga yang terlibat, rendahnya daya manusia dari anggota tenaga kerja, beban ketergantungan yang membatasi partisipasi dalam angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja hanya menguntungkan.

Sebuah produktivitas rata-rata yang rendah dari angkatan kerja karena kekurangan modal relatif terhadap tenaga kerja dan penggunaan teknologi terbelakang. Ketika tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan yang berkelanjutan dalam kapasitas produksi, kesempatan kerja dengan meningkatnya produktivitas yang dihasilkan. Hal ini pada gilirannya

memungkinkan untuk penyerapan progresif dan integrasi pengangguran dan setengah menganggur dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dengan tingkat yang lebih tinggi produktivitas. Dalam proses ini, masyarakat miskin mungkin dapat mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan mereka dalam pekerjaan yang sudah ada, atau beralih ke pekerjaan baru yang melibatkan tinggi tingkat keterampilan dan / atau teknologi yang lebih baik. Hasil dari proses yang dijelaskan di atas dapat tercermin dalam: (a) peningkatan produktivitas berbagai sektor dan pekerjaan, (b) pergeseran struktur kerja terhadap pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan (c) peningkatan upah riil, pendapatan dari wirausaha, dan pendapatan dari upah kerja.



Gambar I.1 Lingkaran Virtuosa hubungan antara pertumbuhan, lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan *commit to user*
Sumber: *International Labour Organization*

Masalah ketenagakerjaan secara terus menerus telah menjadi problem yang berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonominya untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya dan meningkat relatif cukup tinggi setiap tahunnya (*Labor Surplus Economy*). Walaupun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (bahkan disebut sebagai salah satu negara yang mengalami “*miracle economi*” sampai dengan tahun 1996, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7.5 dari tahun 1970-1996), kondisi krisis ketenagakerjaan (*Employment Crisis*) semakin nyata. Ini semua disebabkan belum pernah adanya model politik ekonomi yang bertumpu pada optimalisasi *human capital* khususnya kesempatan kerja (*Employment based Economy*).

Krisis ketenagakerjaan ini semakin lebih diperburuk lagi oleh krisis moneter tahun 1997. Krisis moneter tersebut telah mengakibatkan terpuruknya perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1997-1999 . Krisis moneter tersebut meluas menjadi multi krisis yang mencakup krisis ekonomi, politik, keamanan, pemerintahan, hukum, kepercayaan, sosial, bahkan krisis moral (*moral hazard*) sehingga *good governance* makin jauh, yang secara keseluruhan menurunkan dan memperparah krisis ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis dari 7.28% tahun 1996, menjadi 4,7% pada tahun 1997, kemudian -13.20% pada tahun 1998, dan 0.23% pada tahun 1999. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut secara nyata telah menyebabkan merosotnya permintaan agregat dan kelesuan pasar, yang selanjutnya menimbulkan banyak perusahaan terpaksa menutup

atau menciutkan kegiatan usahanya. Disamping itu, daya tarik di dunia investasi juga berkurang sebagai akibat krisis kepercayaan para pengusaha terhadap keberhasilan pemerintah mengatasi kasus-kasus konflik dan keamanan di berbagai wilayah, seperti di Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan terakhir sekali di Kalimantan Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akumulasi krisis ketenagakerjaan merupakan turunan pertama dampak krisis ekonomi serta krisis *social capital*.

Krisis ketenagakerjaan ini selanjutnya telah menurunkan pendapatan masyarakat dan sudah barang tentu mengakibatkan penurunan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kemiskinan di Indonesia yang dapat dilihat dari semakin berkurangnya konsumsi makanan, menurunnya angka harapan hidup dan banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf. Berdasarkan laporan dari PBB untuk program pembangunan (UNDP Report tahun 2007 dan tahun 2008) krisis ekonomi di Indonesia telah mengakibatkan penurunan ranking indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) Indonesia dari urutan 111 pada tahun 2007 menjadi urutan 107 pada tahun 2008 dari 192 negara. Angka kemiskinan di Indonesia tidak hanya meningkat secara nasional tetapi juga semakin timpang antar propinsi khususnya wilayah-wilayah propinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih parah lagi, krisis ketenagakerjaan ini dapat mengakibatkan krisis sosial, seperti meningkatnya tingkat kematian khususnya kematian bayi, meningkatnya kriminalitas, penggunaan narkoba, depresi, bunuh diri, perceraian, dan masalah-masalah demoralisasi lainnya.

Anaman (2004) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama (2005–2008) naik rata-rata sebesar 17,9 persen per tahun atau meningkat dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp985,7 triliun pada tahun 2008. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 17,7 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 18,1 persen per tahun.

Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan belanja modal dan bantuan sosial yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 22,0 persen dan 23,4 persen per tahun. Kenaikan belanja modal dan bantuan sosial ini sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, kenaikan belanja pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, terutama subsidi BBM dan listrik. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan tingkat kesejahteraan rakyat meskipun tekanan harga minyak mentah dunia terus dialami sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2004-2009.

Sementara itu, dalam rangka meredam gejolak krisis ekonomi global, pada tahun 2009 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp73,3 triliun untuk stimulus fiskal. Dana tersebut ditujukan terutama untuk (1) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (3) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Pada tahun 2009, realisasi belanja negara per 31 Desember sebesar Rp954,0 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp645,4 triliun dan belanja ke daerah sebesar Rp308,6 triliun sebagaimana terlihat pada Tabel I.3 berikut:

Tabel I.3
Realisasi Belanja Negara 2004-2009 (Rp Miliar)

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009*)
Belanja pemerintah Pusat	361.155,2	440.032,2	504.623,4	693.355,9	645.435,5
Belanja Ke Daerah	150.463,9	226.179,9	253.263,2	292.433,4	308.565,6
Belanja Negara	509.632,4	667.128,9	757.649,9	985.730,6	954.001,1
Rasio Belanja Negara Thd PDB (%)	18,3	20,0	19,2	19,9	17,9

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Angka Realisasi 31 Desember 2009

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian yang menganalisa hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional. Penelitian ini mengambil periode waktu dari tahun 2005-2009. Dasar permasalahan yang muncul diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 2005-2009”**.

commit to user

A. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2009 ?
2. Apakah variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2009 ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh-pengaruh variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2009.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh-pengaruh variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2009.

C. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat di uji kebenarannya terkait masalah hubungan antar variabel makro terhadap masalah kemiskinan nasional.
2. Bagi pengambil keputusan, dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi.
3. Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman terkait masalah-masalah ekonomi pembangunan khususnya dalam bidang kemiskinan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan agar penelitian selanjutnya memperoleh hasil yang semakin baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI

1. Pertumbuhan ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Lebih lanjut Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 1996: 72) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Kuznets ada 6 karakteristik pada proses pertumbuhan ekonomi negara maju:

- 1) Tingginya tingkat pertumbuhan output perkapita dan penduduk.
- 2) Tingginya tingkat kenaikan jumlah faktor produksi terutama tenaga kerja.
- 3) Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
- 4) Tingginya tingkat transformasi sosial dan teknologi.

commit to user

- 5) Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk ke seluruh dunia guna mendapatkan pasar dan bahan baku, dan
- 6) Pertumbuhan ekonomi hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi, karena pada umumnya pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, seperti halnya pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan atau ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi mengandung 3 unsur (Suryana, 2000:3) diantaranya:

- 1) Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- 2) Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3) Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

b. Teori Umum Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Klasik

Menurut Adam Smith ada dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: Pertumbuhan output total dan

pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga (Lincoln Arsyad. 1992: 49), yaitu:

- a) Sumber Daya Alam yang tersedia (atau faktor produksi “tanah”)
- b) Sumber insani (atau jumlah penduduk)
- c) Stok barang modal yang ada

Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan secara sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang akan memegang peranan dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal. Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Sehingga, laju pertumbuhan

permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

2) Teori Neoklasik

Teori pertumbuhan neo klasik melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan (Sadono Sukirno, 1999: 436):

$$\Delta Y = f(\Delta k, \Delta L, \Delta T) \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana : ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan barang modal

ΔL = tingkat pertumbuhan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara matematik untuk menunjukkan kesimpulan berikut:

$$g = m.\Delta K + b.\Delta L + \Delta T \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana:

g = tingkat presentasi pertumbuhan ekonomi

m = produktivitas modal marginal

b = produktivitas marginal tenaga kerja

Persamaan ini pada hakikatnya menyatakan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tergantung kepada:

- a) Pertambahan modal dan produktivitas modal marginal
- b) Pertambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal
- c) Perkembangan teknologi

Sebenarnya sumbangan terpenting dan teori pertumbuhan neo klasik bukanlah hanya sekedar dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi kemungkinan menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empirik untuk menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

3) Teori Harrod Domar

Teori ini pada hakekatnya menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal (K) dan jumlah produksi nasional (Y). Hal ini dapat disusun dari model sederhana (Suryana, 2000: 66).

- 1) Tabungan (S) adalah beberapa proporsi (s) dari pendapatan nasional (Y), sehingga $S = s \cdot Y$
- 2) Investasi (I) sebagai perubahan stok modal (ΔK) maka $I = \Delta K$

3) Stok modal membawa hubungan langsung dengan pendapatan nasional (Y), maka: $\Delta K = K \cdot \Delta Y$

4) S harus sama dengan I, maka $S = I$, maka

$S = s \cdot Y = K \cdot \Delta Y = \Delta K = I$, disederhanakan menjadi:

$s \cdot Y = K \cdot \Delta Y$ dibagi dengan Y dan K, sehingga:

$s/k = \Delta Y/Y$, dimana $\Delta Y/Y$ adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Persamaan pertumbuhan yang sederhana seperti diatas dapat digunakan untuk meramalkan dan merencanakan perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang. Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan diatas bahwa agar suatu negara bisa tumbuh pesat maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin dari proporsi output total (Y) atau PDB nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan akan semakin cepat. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata seharusnya tergantung pada produktivitas dari investasi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasikal dari Solow, dan teori Klasik maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni: 1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) kemajuan teknologi. Dalam kaitannya dengan kemiskinan diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut dapat menurunkan kemiskinan. Investasi melalui penyerapan tenaga kerjanya baik oleh swasta maupun oleh pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif dan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia (*human capital*).

2. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Perkataan “Kemiskinan” sudah tidak asing lagi. Tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan, masih simpang siur. Berikut ini, kutipan beberapa definisi kemiskinan,. Sar A. Levitan, mendefinisikan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Karena standard hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal. (Bayo, 1996:3)

Menurut Bradley R. Schiller, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Dan oleh Emil Salim, dikatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. (Bayo, 1996: 4). Oleh Jhon Friedman, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau asset (misalnya: tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya); sumber-sumber keuangan (*income* dan kredit yang mendanai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain.

Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. *Pertama*, sarana prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri *kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa kemiskinan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek material saja. Tetapi juga menyangkut aspek-aspek non material. Seperti dikatakan oleh Wriggins bahwa menurut cerita lama, tidak seorangpun bisa hidup dari sepotong roti saja, maka kemiskinan absolut juga mempunyai dimensi non-material di samping aspek material. Atau seperti di simpulkan oleh Scott sebagai berikut: *pertama*, kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan didefinisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Kedua*, kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kekurangan

atau tidak memiliki aset-aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lainnya. *Ketiga*, kemiskinan non-material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak. (Bayo, 1996:5)

Kemiskinan itu bersifat multidimensial, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial, politik dan pengetahuan serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. (Arsyad, 1997:218)

Kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktifitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa ditimbulkan selain hal yang sifatnya alamiah atau kultural yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh

suatu golongan masyarakat karena struktural sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. (Arsyad, 1997:219)

b. Ukuran Kemiskinan

Ada tiga ukuran utama yang diusulkan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke (1984) dalam Lipton (1985) ukuran itu adalah:

1) *Head-Count Measureindex H*

Teori *Head-Count Measureindex H* adalah teori yang memperkirakan jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan. Ukuran jumlah orang (*Head- Count Measure*) di dalam menentukan tingkat kemiskinan diperoleh dari :

$$H = q/n \cdot 100$$

Keterangan :

H = Tingkat Kemiskinan

Q = Jumlah penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah Penduduk

2) *Poverty Gap Index PG*

Teori *Poverty Gap Index PG* adalah teori yang memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan mengatasi masalah kemiskinan. Untuk mengukur kesenjangan kemiskinan (*Poverty gap*) dilakukan berbagai bentuk tergantung tujuan yang ingin dicapai dengan ukuran tersebut disamping perkiraan jumlah dana

yang harus disediakan untuk menghapus kemiskinan, tidak jarang pula ukuran harus disediakan ini disediakan untuk menghapus kemiskinan, tidak jarang pula ukuran harus disediakan ini dinyatakan secara relatif yaitu perbandingan antara jumlah kesenjangan kemiskinan dengan variabel lain, seperti PDB, jumlah pendapatan penduduk miskin, jumlah pendapatan penduduk tidak miskin, jumlah pengeluaran pemerintah, jumlah bantuan luar negeri, atau nilai ekspor. Kesenjangan kemiskinan diukur dengan memperlihatkan perbedaan tingkat pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinannya, rumusnya:

$$PG = Gk - Yp$$

Keterangan :

PG = Kesenjangan Kemiskinan

Gk = Garis Kemiskinan

Yp = Pendapatan Penduduk Miskin

Bila kesenjangan kemiskinan akan diukur secara relatif diperoleh dengan cara

$$\% PG = PG/Vt . 100\%$$

Keterangan:

%PG = kesenjangan kemiskinan relatif

Vt = variabel tertentu secara perkapita, seperti PDB, bantuan luar negeri, pendapatan penduduk miskin, jumlah pengeluaran pemerintah dan sebagainya.

3) *The Foster, Greer, Thorbecke P₂ Measure*

FGT P₂ adalah *poverty gap* dari orang miskin yang ditimbang dengan *poverty ganya* untuk menafsir kemiskinan agregat jadi:

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2 = \text{rata kuadrat dari proporsi } \textit{poverty gap}$$

Dengan membandingkan rumus ketiga H, PG, dan P₂ di atas strukturnya menjadi jelas dengan menggolongkan ke dalam ukuran tambahan secara umum:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Untuk a adalah parameter non-negatif

Ini adalah ukuran kemiskinan dari Foster, Greer, Thorbecke (Foster, 1984). P_a adalah rata-rata dari seluruh populasi dari ukuran kemiskinan individual dimana mempunyai nilai

$\left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ untuk orang miskin dan nol untuk non-miskin.

Ada ukuran kemiskinan tambahan lainnya yaitu:

$$P = \sum_{i=1}^q p \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \text{ dimana } P(z, y_i) \text{ adalah ukuran kemiskinan}$$

individual, bernilai nol untuk non-miskin (y_i, z) dan bernilai positif untuk si miskin nilainya adalah fungsi antara garis kemiskinan dan standar hidup individual. (Atkinson, 1987)

c. Kriteria Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Defenisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada dasarnya defenisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya

tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Sedangkan menurut Quibria (1991) dan Billah (1992, 185), beberapa karakteristik kemiskinan di Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai berikut:

- 1) kemiskinan lebih banyak ditemui di pedesaan daripada di perkotaan.
- 2) kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif dengan jumlah pekerjaan dalam suatu keluarga.
- 3) kemiskinan ditandai oleh rendahnya kepemilikan asset keluarga.
- 4) pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi rumah tangga miskin.
- 5) kemiskinan berkaitan dengan masalah sosial budaya yang dinamis.

S. Hadiwigeno dan A. Pakpahan (1992:27) dalam mengidentifikasi wilayah miskin di Indonesia, merangkum karakteristik utama wilayah miskin dan perkiraan penyebab utama kemiskinan pada wilayah miskin di Indonesia yang di kelompokkan menurut:

- 1) sumber daya alam
- 2) teknologi dan unsur pendukungnya
- 3) sumber daya manusia
- 4) prasarana dan permodalan
- 5) prasarana dan kelembagaan

Karakteristik lain dari tingkat kemiskinan adalah apa yang dinamakan dengan *kemiskinan sementara* dan *kemiskinan kronis*. *Kemiskinan sementara* terjadi karena adanya, misal: bencana alam. Sementara *kemiskinan kronis* terjadi pada mereka yang kekurangan keterampilan, asset dan stamina. Intensitas kemiskinan pada berbagai bagian masyarakat miskin dapat diukur dengan "*Sen Index of Poverty*". (Sen, 1973)

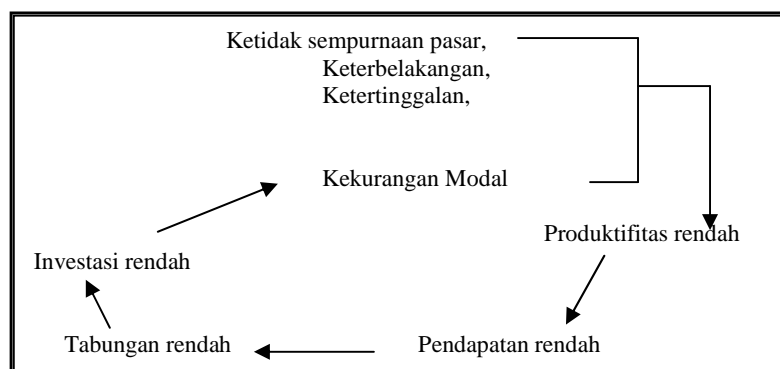
d. Penyebab Kemiskinan

Ada banyak penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah perang dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya.

Sharp (1996) mencoba mendefinisikan penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan

dalam kualitas sumber daya manusia. kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurang modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953 yang mengatakan: "a poor country is poor because it is poor" (negara miskin itu karena dia miskin).



Sumber: Kuncoro, 2000:107

Gambar II.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

commit to user

Negara berkembang sampai kini masih memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan, sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal.

Breman dalam Misbach (2004:30), mengatakan bahwa bagi kaum miskin “jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalan ke bawah terlalu mudah dilalui”. Munculnya kemiskinan dikalangan masyarakat miskin lebih disebabkan karena himpitan struktural, karena kemiskinan yang kronis itulah kaum miskin mudah ditaklukkan dan dikelola untuk mengikuti kemauan dan kepentingan golongan elit berkuasa. Kemiskinan tidak semata-mata muncul karena kebudayaan tetapi lebih berkaitan dengan tatanan ekonomi dan sosial yang membatasi peluang kaum miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua sektor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan semakin banyaknya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang

tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, sementara apapun distribusi pendapatan di suatu negara jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan maka kemelaratan juga akan semakin meluas. (Todaro, 1998)

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak ikut serta dalam proses pembangunan antara lain karena faktor alamiah di samping faktor tidak alamiah. Sering kali ditemukan fakta, bukan masyarakat tertentu yang tidak mau berupaya untuk maju dan berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi ada faktor penghalang yang menjadi penyebabnya. Ada prosedur berbelit yang harus diterima masyarakat kelas bawah untuk maju. Memang hal ini sangat memprihatinkan, sehingga ada anggapan yang menyatekan bahwa golongan masyarakat yang kaya semakin kaya dan golongan masyarakat yang miskin semakin miskin. Dapat dicontohkan dalam proses pengucuran dana perbankan yang dirasa kurang adil untuk golongan menengah kebawah. Bank menstandarkan agunan yang cukup besar jumlahnya untuk masyarakat yang belum tentu memiliki jaminan untuk menebus sekian rupiah yang akan dipinjamkan.

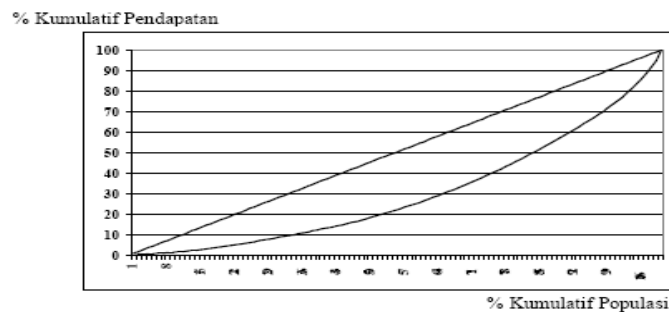
Oleh karena itu, di samping masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktifitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan selain timbul oleh faktor yang bersifat alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang ada sebenarnya tersedia bagi mereka. (Kuncoro, 2000)

e. Mengukur Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analitis dan kuantitatif, yakni distribusi ukuran dan distribusi fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga, biasanya semua individu diurut berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total poulasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran dengan menggunakan Rasio Kuznets.

Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Ismoro, 1995 yang dikutip oleh Rahayu, dkk., 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Pengukuran masalah pemerataan telah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmunan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *Gini coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Lorentz curve* (Gambar 2.2). Sedangkan untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan metode *headcount measure* dan *poverty gap*. Ukuran yang dipakai dalam menentukan ketidakmerataan baik di tingkat wilayah maupun rumah tangga adalah *gini coefficient* dan tingkat kemiskinan.

Jika Kurva Lorenznya semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah maka berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan disuatu negara semakin parah. Terakhir untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relatif yakni dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana Kurva Lorenz itu berada, dikenal dengan nama Koefisien Gini.



Gambar II.2. Kurva Lorentz dan Garis Pemerataan Pendapatan
Sumber: (Santosa dan Prayitno, 1996 oleh Rahayu, dkk., 2000)

Gini coefficient merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik (Bappenas, 2002). Menurut Cobwell (1977) yang dikutip oleh Mitchell (1991) menyatakan bahwa pengukuran ketidakmerataan dapat menggunakan *gini coefficient*.

B. Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang ekonomi makro, maka penanaman modal atau investasi adalah pengeluaran yang menambah modal baru bagi masyarakat. Modal baru tersebut dapat berupa penambahan sejumlah uang yang diinvestasikan maupun penambahan pada faktor-faktor produksi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan.

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing (Dumairy, 1997: 132).

Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing pertama kali disahkan oleh Presiden Suharto pada tahun 1967 dengan munculnya UU No 1 Tahun 1967, lalu setelah mengalami perkembangan yang kurang memihak investor dalam negeri pemerintah mengesahkan kembali UU Modal No. 25 Tahun 2007. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”, harus memenuhi beberapa unsur berikut (Ps.1(3)):

- a. Merupakan kegiatan menanam modal
- b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- c. Dilakukan oleh penanam modal asing,
- d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang juga tidak lepas dari permasalahan kurangnya modal (tabungan dan investasi) oleh karena itu investasi menjadi salah satu sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan.. Harus diakui bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dapat di biayai oleh pemerintah, sehingga keterlibatan sektor swasta sangat diperlukan.

Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karenanya pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, yaitu dengan meningkatkan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

PMA berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di negara tuan rumah, pertama lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti penambah output atau PDB, total ekspor (X) dan Kesempatan Kerja (KK). Ini adalah dampak langsung. Kedua masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Apabila PMA mengalami kemunduran dapat dipastikan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap banyaknya pengangguran yang berakibat pada peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Deregulasi investasi asing melalui PP 20/1994, pada umumnya banyak dipuji, karena dianggap akomodatif terhadap kepentingan perekonomian nasional, ditengah persaingan global untuk memberi daya tarik pada investor asing. Namun di lain pihak, muncul pula kekhawatiran oleh pihak-pihak tertentu mengenai terganggunya otoritas ekonomi kita jika kemudian investasi asing mengalir dalam jumlah besar. Deregulasi sektor riil tersebut dalam pandangan ekonomi dapat dianggap baik, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun bagi para sudut pandang yang lain (non ekonomi) kadang-kadang diinterpretasikan yang berbeda misalnya dianggap "kurang nasionalistis" (A. Tony P, 1995:245).

Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Pendapat tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Kalau ada modal dan modal tersebut diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi (Arif Budiman, 1999 : 19).

Dalam menelaah sebab-sebab kemiskinan menurut Lewis, disebabkan oleh dan selama proses dari perubahan sosial secara fundamental, seperti transisi dari feodalisme ke kapitalisme (dapat terwakili oleh Penanaman Modal Asing dan Dalam Negerisebagai bentuk kapitalisme modern), perubahan teknologi yang cepat, kolonialisme dan sebagainya (Frans Seda, 1986: 131).

Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang-barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru, kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran (karena terciptanya lapangan kerja yang baru) dan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dimana diharapkan akan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tingginya angka pengangguran pun tidak bisa diatasi dengan penanaman modal asing. Sebab, investor asing biasanya bergerak di bidang pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, tingginya biaya yang harus ditanggung setelah proyek beroperasi pun sangat merugikan bangsa Indonesia. Pihak Indonesia belum bisa menikmati bagi hasilnya selama biaya yang diminta investor belum terlunasi. Padahal, investor bisa saja berbohong mengenai biaya yang dibelanjakan untuk eksplorasi (*recovery cost*). Data yang dikemukakan pihak investor seringkali perlu dipertanyakan keakuratannya. Sebagai contoh, Exxon mobil menyatakan cadangan minyak di Blok Cepu sebesar 781 juta barel dengan kapasitas produksi 165 ribu barel per hari. Dengan demikian, masa eksplorasinya hanya berkisar 11 tahun atau 12 tahun.

Namun, pihak Exxon mobil justru memperpanjang kontrak dari 2010 hingga 2030, yang mengindikasikan bawa tentu cadangan minyak jauh lebih besar dari yang dikemukakan.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing.

PMDN adalah penggolongan modal, kekayaan masyarakat Indonesia baik perorangan atau badan hukum termasuk di dalamnya benda bergerak ataupun benda tak bergerak bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. (penjelasan UU No. 6 Tahun 1968 pasal 1 dalam Endar Supriyanto, 2006: 21)

Sedangkan menurut BKPM (2002: 17), PMDN adalah modal dalam negeri yang diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak, benda-benda (benda bergerak atau benda tidak bergerak) yang dapat disisihkan untuk menjalankan usaha.

Pembangunan suatu bangsa memerlukan dana untuk melaksanakan investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam pelaksanaannya investasi

berlandaskan pada kemampuan sendiri, disamping memanfaatkan sumber-sumber lainnya sebagai pendukung. Modal investasi dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung.

a. Secara Langsung

Penanaman modal secara langsung adalah sumber dari pemilik sendiri. Dalam menjalankan usaha pasti seorang investor juga memiliki modal awal dari miliknya sendiri selain modal yang didapat dari pihak lain.

b. Secara Tidak Langsung

1) Lembaga Perbankan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk. Dengan adanya simpanan dari masyarakat tersebut, maka investor dapat meminjam dana investasi dari bank-bank yang ada. Dana dari perbankan bersifat jangka pendek karena simpanan masyarakat itu merupakan deposito berjangka yang pengambilannya sudah ditentukan.

2) Pasar Modal

Pasar Modal dianggap sebagai salah satu sarana yang efektif guna mempercepat pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini dikarenakan pasar modal dapat menggalang pengerahan dana masyarakat untuk disalurkan pada investor. Pasar modal merupakan alternatif sumber dana bagi pembiayaan proyek

investasi. Dana dari pasar modal merupakan dana yang bersifat jangka panjang. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDB.

3. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. (BPS, 2008)

4. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk:

- a) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- b) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

c) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Cara Menghitung, Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.(Data Statistik, 2008.

Cara Menghitung:

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Rumus

$$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Dimana:

LIT_{15+}^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t

L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun t

P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

6. Konsumsi Makanan

Konsep konsumsi, yang merupakan konsep yang di Indonesia dari bahasa Inggris "Consumption". Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-

barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.(Dumairy, 1996) Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan *disposebel*) perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan :

Fungsi konsumsi ialah : $C = a + bY$

Dimana a adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, b adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan nasional.

Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan *disposebel* dengan konsumsi dan pendapatan *diposebel* dengan tabungan konsep kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung.

Kecondongan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai MPC (berasal dari istilah inggrisnya *Marginal Propensity to Consume*), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara

commit to user

pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (ΔY_d) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{MPC} = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$$

Kencondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC (*Average Propensity to Consume*), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disposebel pada ketika konsumen tersebut dilakukan (Y_d). Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{APC} = \frac{C}{Y_d}$$

Dalam ilmu makroekonomi (Samuelson, 1995:123) konsumsi adalah jumlah seluruh pengeluaran perorangan atau negara untuk barang-barang konsumsi selama suatu periode tertentu. Konsumsi berarti perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut. Pengertian konsumsi dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, golongan dari konsumsi rumah tangga yaitu apabila suatu rumah tangga membeli peralatan rumah seperti meja makan dan tempat tidur. Sedangkan yang termasuk golongan dari konsumsi pemerintah, apabila pemerintah membeli kertas, alat-alat tulis dan peralatan kantor (Sukirno, 2000:337).

Menurut Partadireja dalam Andrianni dalam Dian (2007) konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lainnya. Dalam kenyataan, besarnya konsumsi berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan keluarga. Hal ini dapat diartikan bahwa konsumsi selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan, apabila tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat, sebaliknya apabila pendapatan menurun maka konsumsi akan menurun.

Konsumsi makanan pokok merupakan proporsi terbesar dalam susunan hidangan di Indonesia, karena dianggap terpenting di antara jenis makanan lain. Suatu hidangan bila tidak mengandung bahan makanan pokok dianggap tidak lengkap oleh masyarakat (Sediaoetama, 1999). Makanan pokok seringkali mendapat penghargaan lebih tinggi oleh masyarakat dibanding lauk-pauk. Orang merasa puas asalkan bahan makanan pokok tersedia lebih besar dibanding jenis makanan lain (Soedarmo dan Sediaoetama, 1985). Di sisi lain makanan dalam pandangan sosial budaya, memiliki makna lebih luas dari sekedar sumber gizi. Hal ini terkait dengan kepercayaan, status, prestis, kesetiakawanan dan ketentraman dalam kehidupan manusia (Sanjur, 1982).

Pada masyarakat, berbagai jenis makanan mempunyai nilai sosial. Orang cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang mempunyai nilai sosial tertentu yang dianggap sesuai dengan tingkat sosial mereka dan hal ini seringkali tidak sesuai dengan nilai gizi makanan. Makanan yang

bernilai gizi tinggi, diberi nilai sosial rendah atau sebaliknya (Sediaoetama, 1999).

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan ketahanan pangan adalah keadaan dimana setiap rumah tangga mempunyai akses terhadap makanan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu gizinya serta aman.

Diversifikasi konsumsi makanan diarahkan untuk memperbaiki konsumsi makanan penduduk baik jumlah mutu dan keragaman sehingga dapat diwujudkan konsumsi makanan dan gizi yang seimbang. Berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan, rata-rata kecukupan energi dan protein per kapita per hari bagi penduduk Indonesia masing-masing 2000 kkal dan 52 gram pada tingkat konsumsi, serta 2.200 kkal dan 57 gram pada tingkat penyediaan.

Pengeluaran/konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga, merupakan salah satu indikator untuk melihat kemiskinan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rumahtangga miskin akan cenderung mempunyai proporsi pengeluaran makanan yang lebih besar dibandingkan rumahtangga kaya. Rumahtangga miskin, tenaga dan pikiran kesehariannya hanya seputar bagaimana bisa makan yang cukup. Beda sekali dengan rumahtangga kaya yang ternyata masih mempunyai pilihan banyak untuk kehidupan, selain pengeluaran makanan.

7. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran mengatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditures*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y , serta mengamatinya dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional.

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakannya tersebut, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena dari kebijakan tersebut. Pengeluaran yang semakin besar dengan tujuan semata-mata hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan pula harus diperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan terpekerjakan atau meningkatkan pendapatannya.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GDP semakin kecil. Tingkat ekonomi lebih lanjut Rostow menyatakan bahwa

pembangunan ekonomi, aktifitas pemerintah akan beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktifitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan, hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.(Guritno, 1995:170)

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah:

a. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan dinegara-negara Eropa, Amerika dan Jepang pada Abad ke 19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum, akan tetapi pada pandangannya tersebut tidak dijelaskan apakah yang dimaksud pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam bentuk pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Hukum Wagner jika pengeluaran pemerintah secara relatif, mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian jika pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.(Guritno, 1995:171).

b. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak meningkat, dan meningkatnya

penerimaan pajak juga menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Oleh karena itu pada keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu pula dengan pengeluaran pemerintah juga semakin besar.

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Teori Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memenuhi besarnya pungutan pajak yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah memerlukan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesadaran untuk membayar pajak. Sikap toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara semena-mena. (Guritno, 1995:171).

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$).

Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. (Mangkoesebroto, 1994).

Pengeluaran pemerintah terdiri dari :

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian. (Mangkoesebroto, 1994)

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan

menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian.

C. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Priyanto yang berjudul Analisis Pengaruh PMA, PMDN Dan Laju Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 1990 – 2003. Pengujian dengan model PAM menunjukkan besarnya koefisien penyesuaian adalah sebesar $\delta=(1-0.857005)=0.142994$. Hal ini menunjukkan bahwa 14,29% merupakan perbedaan antara Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya dengan Tingkat Kemiskinan yang diinginkan tercapai dalam satu periode. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan alat analisis model PAM variabel PMA, PMDN Dan Laju Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa Tingkat Kemiskinan dalam jangka panjang adalah 59,273528 ribu orang tanpa dipengaruhi

Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien elastisitas jangka panjang variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah : -0.22147 (inelastis).

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sumanta (2005) yang berjudul Kebijakan Ekonomi Pertumbuhan dalam Kemiskinan dengan menggunakan variabel independent yang dipakai adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat melek huruf, tingkat kesehatan masyarakat (angka harapan hidup), tingkat penggunaan listrik di rumah tangga, dan tingkat konsumsi makanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh variabel Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto dan Melek Huruf, mempunyai pengaruh terhadap Kemiskinan variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin adalah variabel jumlah penduduk sedangkan variabel PDB dan angka melek huruf berkorelasi negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006) yang berjudul Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan analisis diskriptif dan analisis ekonometrika diperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut relatif tidak besar, inflasi dan populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing-masing relatif kecil. Peningkatan share sektor pertanian dan share sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah terhadap kemiskinan. Variabel yang signifikannya relatif

paling besar pengaruh signifikannya terhadap penurunan kemiskinan ialah Peningkatan share sektor pertanian dan share sektor industri. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsubar Saleh (2002) yang berjudul Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan analisis data panel diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia (yang terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan dan populasi penduduk tanpa akses fasilitas air bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Agussalim yang berjudul Sanggupkah Pengeluaran Pemerintah Mereduksi Kemiskinan. Untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan dan ketimpangan akan digunakan kerangka modeling yang bersifat simultan (*simultaneous equation regression model*) dengan menggunakan teknik regresi *two stage least square (2SLS)*. Dalam model ini, pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan diperlakukan sebagai variabel endogen, sedangkan pengeluaran pemerintah (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan kesejahteraan sosial) dan variabel makro-

ekonomi (investasi, keterbukaan, inflasi, dan tenaga kerja) diperlakukan sebagai variabel eksogen. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (GED) dan kesehatan (GHE) merupakan sebuah kebijakan yang "pro-poor", bahkan untuk semua ukuran kemiskinan, sebagaimana persepsi populer yang berkembang selama ini. Yang menarik, pengeluaran kesehatan tidak seperti halnya pengeluaran pendidikan, disamping merupakan sebuah kebijakan yang "pro-poor", juga sekaligus merupakan sebuah kebijakan yang "pro-growth". Dengan kata lain, pengeluaran kesehatan merupakan "win-win policies".

Penelitian yang dilakukan oleh Dipendra Sinha yang berjudul "Ketidakstabilan Ekspor, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asia: Analisis Time Series". Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara stabilitas ekspor, investasi dan pertumbuhan ekonomi di sembilan negara Asia berikut: India, Jepang, (Selatan) Korea, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, SriLanka dan Thailand. dengan menggunakan data time series. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan metode *FEM* dengan bantuan *software Eviews 6*. Hasil dari penelitian ini terdapat ketidakstabilan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Untuk India, hasilnya dicampur. Untuk Jepang, Malaysia, Malaysia, Filipina dan Sri Lanka, bukti menunjukkan suatu negatif hubungan antara ketidakstabilan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Untuk Korea, Myanmar, Pakistan dan Thailand, hasilnya menunjukkan hubungan

positif antara ketidakstabilan ekspor. Dalam kebanyakan kasus, variabel investasi ditemukan positif berhubungan dengan ekonomi pertumbuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizwanul Islam yang berjudul "Ekonomi Perhubungan, Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Analisis Empiris". Penelitian ini bertujuan untuk melihat dari hubungan antara tingkat kemiskinan dan intensitas kerja dengan pertumbuhan serta sebagai analisis perbandingan mikro (rumah tangga) data tingkat dari sejumlah studi negara dengan menggunakan variabel ukuran kemiskinan, persentase tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, persentase tenaga kerja dalam bidang manufaktur, melek huruf orang dewasa (dalam persentase) dan rasio ketergantungan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil regresi tersebut di atas, hipotesis dampak kerja dan variabel pasar tenaga kerja pada penanggulangan kemiskinan tampaknya tetap kuat. Hal ini dapat dipecah menjadi beberapa komponen: (a) konsentrasi pekerja di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan, (b) pergeseran pekerja untuk manufaktur mengurangi kemiskinan, (c) pendidikan tenaga kerja (atau populasi secara keseluruhan) berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, dan (iv) lebih tinggi beban ketergantungan menyebabkan kemiskinan.

D. Kerangka Pemikiran

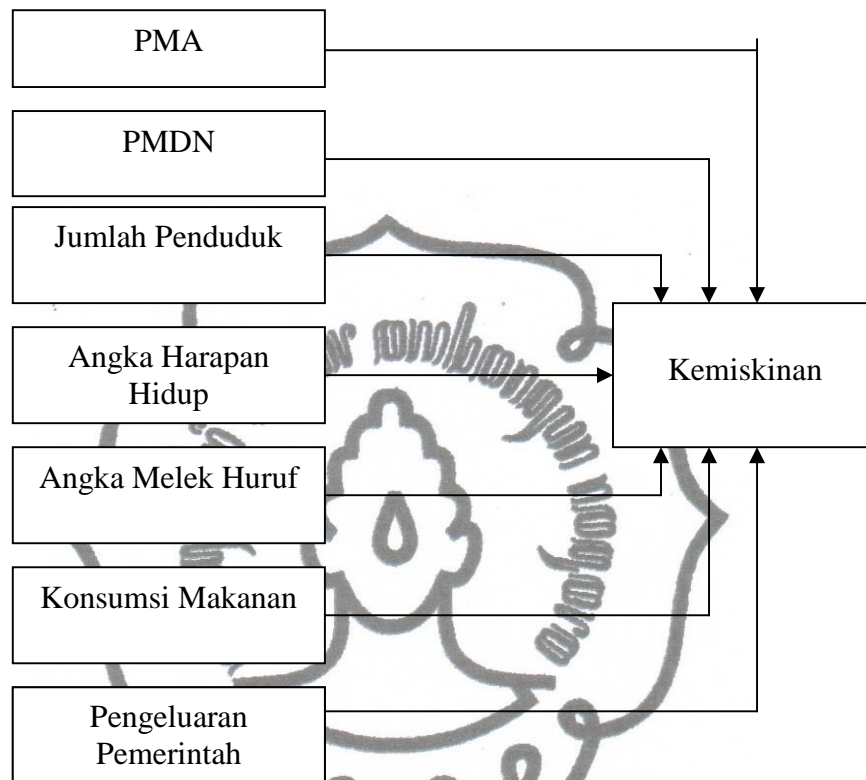
Proses pembangunan memerlukan *Gross National Product (GNP)* yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan peningkatan indikator-indikator perekonomian yang meliputi peningkatan devisa dalam negeri melalui investasi baik dalam maupun luar negeri, terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Negara dengan tingkat kemiskinan tinggi biasanya menduduki peringkat rendah dari indikator sosial seperti angka melek huruf orang dewasa, angka harapan hidup saat lahir dan malnutrisi anak. Sama halnya dengan ukuran pendapatan, informasi tingkat nasional mungkin menggambarkan besarnya ketidakmerataan di suatu negara.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional Indonesia pada tahun 2005-2009, yaitu antara lain PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah yang akan dianalisis menggunakan model regresi linier berganda dengan mengambil pendekatan regresi *pooled data*. Disamping itu juga akan digunakan analisis ekonometri untuk menguji asumsi klasik serta beberapa uji statistik. Variabel-variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Miskin akan sebagai dependen variabel, sedangkan variabel independennya meliputi PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah.

Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :

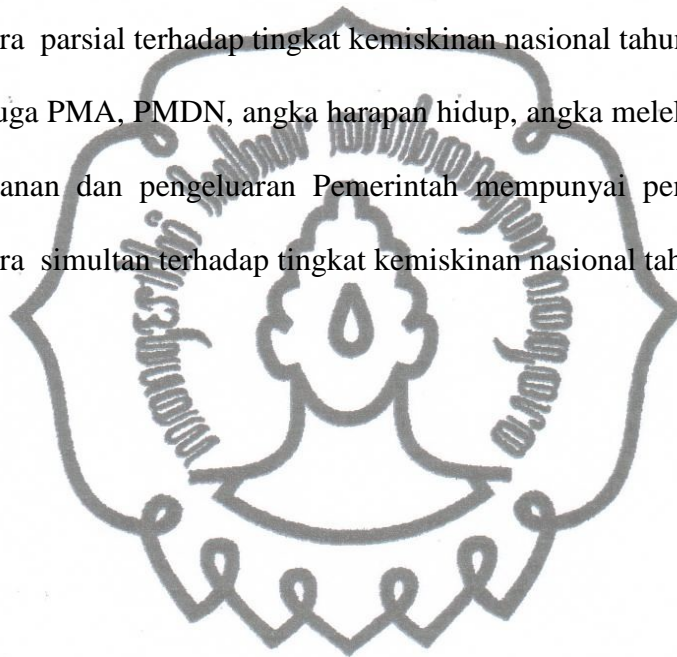


Gambar II.3 Kerangka Pemikiran Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan nasional Indonesia tahun 2005-2009

E. HIPOTESIS

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan nasional tahun 2005-2009.
2. Diduga PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan nasional tahun 2005-2009



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai studi empiris, penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) yang memfokuskan pada hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis seperti yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut dimensi waktunya, penelitian ini bersifat *pooled*, yaitu observasi yang melibatkan data *time series* dan *cross section* pada indikator-indikator pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kemiskinan nasional Indonesia tahun 2005 hingga tahun 2009.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan mengambil data Panel, yaitu observasi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section* antara tahun 2005-2009 tiap propinsi di Indonesia. Yang bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan nasional. Pemilihan periode waktu tersebut dimaksudkan karena pada periode waktu tersebut terjadi krisis *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007 memicu timbulnya krisis ekonomi global yang mengakibatkan harga saham di Bursa Efek Indonesia menurun tajam dan nilai tukar di negara-negara berkembang berdampak jatuh sehingga

membuat negara dan perusahaan yang memiliki hutang luar negeri jatuh miskin sehingga menarik untuk diamati.

C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, data yang digunakan dikategorikan sebagai data sekunder yang merupakan data penggabungan dari data *cross section* dan *time series* yang diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan yang diperlukan. Adapun data yang akan digunakan meliputi :

1. Data PMA dan PMDN diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia
2. Data kemiskinan, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan diperoleh dari Badan Pusat Statistik
3. Data pengeluaran pemerintah diperoleh dari Departemen Keuangan

E. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang bersifat menentukan dan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau tergantung pada variabel independen. Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain :

1. Variabel dependen atau variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan nasional yang di ukur dalam satuan Juta orang

2. Variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, terdiri dari :

a) Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA adalah besarnya Investasi Asing yang masuk ke Indonesia baik dalam bentuk investasi langsung yang besarnya diukur dalam Jutaan US dollar (\$). (BPS,2009)

b) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal atau kekayaan masyarakat Indonesia, baik perorangan atau badan hukum termasuk di dalamnya benda bergerak ataupun tidak bergerak bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya (Penjelasan UU No.6/tahun 1968 pasal 1) yang dinyatakan dalam miliar rupiah. (BPS, 2009)

c) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. (BPS, 2009)

d) Angka Melek Huruf (dewasa)

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. (BPS, 2009)

e) Konsumsi makanan

Konsumsi makanan dalam proporsi pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk mengkonsumsi makanan (pangan). (BPS,2009)

f) Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah .(BPS,2009)

F. Metode Analisis Data

Data panel adalah sebuah *pooled data* atau kumpulan data yang berisi data sampel individu pada sebuah periode waktu tertentu dengan kata lain, data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*). Data panel lebih ditujukan pada analisa unit *cross section*, heterogenitas antar unit merupakan bagian pelengkap. Terdapat tiga metode dalam penaksiran data panel, diantaranya adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*), *fixed effect*, dan *random effect*.

Menurut Hsiao (Hsiao, 1990:3-4), penggunaan *panel data* dalam penelitian ekonomi mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan data *time series* atau data *cross section* biasa. *Pertama*, dalam data panel biasanya memberi kepada peneliti sejumlah data yang banyak, menaikkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan mengurangi kolinearitas (hubungan) diantara variabel penjelas (*explanatory variables*). Oleh karena itu akan menghasilkan estimasi ekonometrika yang efisien. *Kedua*, yang lebih penting lagi adalah data longitudinal membolehkan peneliti untuk *commit to user*

menganalisis sejumlah pertanyaan penting yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan data *cross section* atau data *time series*. Ketiga, menghindari *omitted variables* atau dapat mengontrol pengaruh *omitted variables*. Keempat, menyederhanakan perhitungan dan *statistical inference*. Selain itu data panel juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan dinamis pada suatu negara dari tahun ke tahun serta memberikan hasil analisis yang lebih variatif, informatif dan efisien.

Ada beberapa alasan mengapa analisis panel data, yaitu (Gujarati, 2003: 637):

1. Dengan OLS biasa, apabila dilakukan terpisah, diasumsikan bahwa parameter regresi tidak berubah antar waktu (*temporal stability*) dan tidak berbeda antar unit-unit individualnya (*cross sectional unit*).
2. Dengan OLS biasa, akan terjadi asumsi yang sempit sempit tentang asumsi klasik; *homoscedasticity* dan *autocorrelation* (pasti homoskedastis dan tidak berkorelasi pada variabel kesalahan).

Dalam menganalisis pengaruh dari PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia digunakan analisis regresi Regresi Linear Berganda dengan metode Data Panel menggunakan pendekatan semua koefisien konstan terhadap waktu dan individu dipakai untuk menghindari angka bias yang muncul dalam sebuah penelitian dengan variabel dependen yaitu Jumlah Penduduk Miskin, dan variabel independen yaitu PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi

makanan dan pengeluaran pemerintah. Model regresinya adalah sebagai berikut

$$POVi = \beta_0 + \beta_1 PMA_{1it} + \beta_2 PMDN_{2it} + \beta_3 AHH_{3it} + \beta_4 AMH_{4it} + \beta_5 KM_{5it} + \beta_6 PP_{6it} + e_i \dots (1)$$

Dimana:

i	: 1,2,3,....,n
$POVi$:Jumlah Persentase Penduduk Miskin (Pddk Mskn)
PMA_{1it}	: Penanaman Modal Asing (PMA)
$PMDN_{2it}$: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
AHH_{3it}	: Angka Harapan Hidup (AHH)
AMH_{4it}	: Persentase Angka Melek Huruf (AMH)
KM_{5it}	: Persentase Konsumsi Makanan (KM)
PP_{6it}	: Pengeluaran Pemerintah (PP)
β_0	: Intersept
t	:waktu

Suatu regresi linear klasik mengasumsikan pendugaan harus *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Artinya persamaan regresi yang dihasilkan dapat dijadikan alat penaksiran yang tidak bias, maka persamaan regresi harus terbebas dari gejala asumsi klasik. Berdasarkan pendapat tersebut maka dilakukan uji asumsi klasik sebelum meregresikan variabel-variabel penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari *multikolinieritas*, *autokolerasi*, *heterokedastisitas*. Sedangkan untuk menguji hipotesis adalah dengan pengujian pengujian koefisien determinasi, koefisien regresi simultan

(Uji F), pengujian koefisien regresi parsial (Uji t), dan koefisien beta standar. Untuk semua pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15.00 *for Windows* dan kesimpulannya akan ditentukan dari nilai p yang muncul. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengamati signifikansi nilai p (*probabilitas Value*) dengan tingkat keyakinan 95% (tingkat signifikansi 5%). Pengujian-pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah: uji *autokorelasi*, uji *multikolinearitas*, uji *autokorelasi* dan uji *heterokedastisitas*.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu hubungan yang sempurna antara beberapa variabel independen (bebas) dalam model regresi. Akibat adanya multikolinearitas adalah estimasi akan terafiliasi sehingga menimbulkan bias (Gujarati,2006)

Uji *multikolinearitas* digunakan untuk menguji ada hubungan yang sempurna atau hubungan yang hampir sempurna diantara variabel bebas pada model regresi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala *multikolinearitas* adalah dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance dibawah 0,1 dan VIF lebih besar dari 10 maka menunjukkan adanya

multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2005)

b. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara serangkaian data observasi yang diuraikan menurut data (*time series*) atau ruang (*cross sections*). Autokorelasi mempengaruhi ketelitian kesalahan pengganggu dalam model regresi berganda (Gujarati, 2006).

Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya *autokorelasi* adalah uji *Durbin-Watson* (D-W). Uji *Durbin-Watson* dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor pengganggu yang berurutan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson*. Panduan mengenai angka *Durbin-Watson* (D-W) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat dalam tabel D-W.

Kriteria pengujian yang digunakan yang digunakan :

- | | |
|-------------------------------|---|
| $0 < d < d_L$ | = Terdapat autokorelasi positif. |
| $d_L < d < D_u$ | = Pengujian tidak dapat disimpulkan. |
| $4 - d_L < d < 4$ | = Terdapat autokorelasi negatif. |
| $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ | = Pengujian tidak dapat disimpulkan. |
| $d_U < d < 4 - d_U$ | = Tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. |

c. *Uji Heteroskedastisitas*

Heteroskedastisitas akan muncul jika terjadi gangguan pada fungsi regresi yang mempunyai varian tidak sama sehingga penaksir OLS tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar (tetapi tetap tidak bias dan konsisten). Salah satu cara untuk mendeteksi masalah *heteroskedastisitas* adalah dengan uji Park. Metode ini mengandung prosedur dua tahap yaitu sebagai berikut (Sritua Arief, 1993:34):

- 1) Melakukan regresi untuk suatu model regresi tanpa mempersoalkan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas sehingga diperoleh nilai residualnya.
- 2) Meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel independen. Apabila dari hasil regresi besarnya semua koefisien regresi tidak signifikan, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika besarnya koefisien regresi ada yang signifikan berarti terdapat masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Statistik

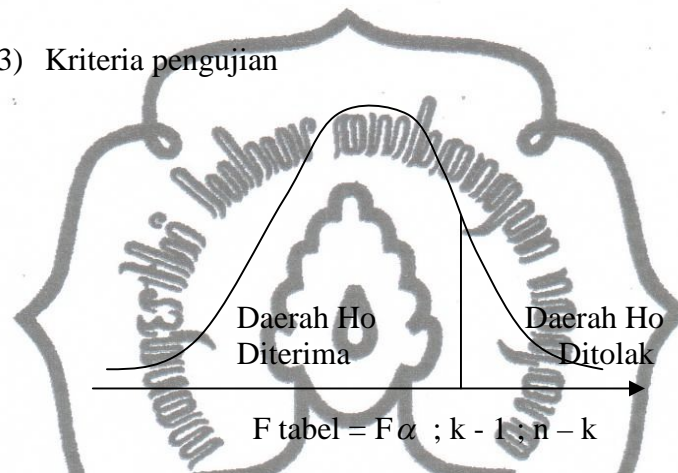
a. Keseluruhan (Uji-F)

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Djarwanto PS, 1993 ; 265)

Prosedurnya sebagai berikut :

commit to user

- 1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama).
 $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama).
- 2) Tingkat keyakinan (*level of significance*) $\alpha = 0,05$
- 3) Kriteria pengujian



Gambar III.1 Statistik Uji-F

H_0 diterima apabila $F \text{ hitung} \leq F\alpha; K-1; K(n-1)$

H_0 ditolak apabila $F > F\alpha; K-1; K(n-1)$

- 4) Menentukan F hitung

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / N - K}$$

- 5) Kesimpulan

(a) H_0 diterima apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$

(b) H_0 ditolak apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

b. Pengujian Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Merupakan pengujian variabel-variabel penjelas secara individual yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen

secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan (Djarwanto PS, 1993 : 191).

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

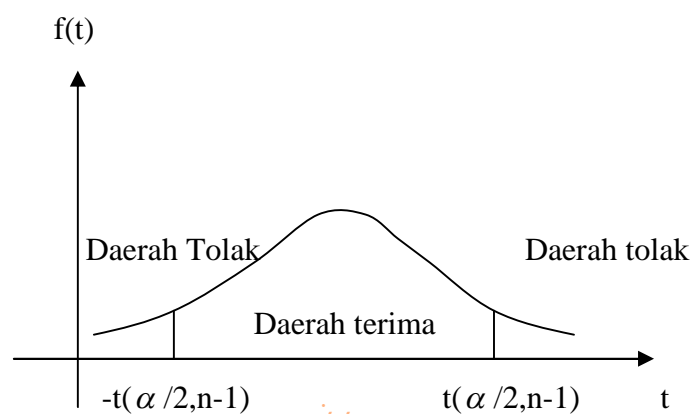
1) Menentukan H_0 dan H_a (Hipotesis nol dan hipotesis alternatif)

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, lama usaha dan jumlah modal terhadap besar kecilnya permintaan pembiayaan murabahah.

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, lama usaha dan jumlah modal terhadap besar kecilnya permintaan pembiayaan murabahah.

2) Menentukan besarnya α untuk mengetahui tingkat signifikansi hasil pengolahan data berdasarkan nilai probabilitas dua sisi (uji dua sisi). Besarnya α yang digunakan adalah 5%.

3) Kriteria pengujian



Gambar III.2 Statistik Uji-t

Ho diterima apabila $-t(\alpha/2, n-1) \leq t \text{ hitung} \leq t(\alpha/2, n-1)$.

Ho ditolak apabila $t \text{ hitung} \leq -t(\alpha/2; n-1)$ atau $t \text{ hitung} \geq t(\alpha/2; n-1)$.

4) Analisis

$$T \text{ hitung} = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)}$$

5) Kesimpulan

- (a) Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ maka Ho ditolak, berarti signifikan.
- (b) Apabila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka Ho diterima, berarti tidak signifikan.

3. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. R^2 dikatakan baik jika semakin mendekati 1. Jika R^2 sama dengan 1 berarti bahwa variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Sedangkan jika R^2 sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Penelitian

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis katulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Karena letaknya antara di dua benua, dan dua samudera disebut juga Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Populasi terbesar 231.370 ribu jiwa pada tahun 2009. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dipilih langsung. Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di pulau Papua dan dengan Timor Leste di pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Uang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah. Masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak sepenuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara. Pemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.

Setelah krisis ekonomi 1997-1999, perekonomian Indonesia secara perlahan mengalami proses pemulihan. Dalam periode 2005-2007, ekonomi tumbuh sebesar 5,92 persen rata-rata per tahun. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2005 bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan kenaikan harga minyak dunia yang memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan yang amat berat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2 kali. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat sampai dengan paruh pertama tahun 2006. Namun, upaya keras pemerintah dan Bank Indonesia melalui serangkaian kebijakan fiskal, moneter maupun paket-paket perbaikan iklim investasi telah berhasil mengembalikan stabilitas perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen pada

tahun 2007. pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang tertinggi semenjak krisis ekonomi memukul Indonesia tahun 1997-1998.

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka pengangguran terbuka juga membawa dampak kepada perbaikan kesejahteraan, seperti yang terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,2 juta orang, dari 37,17 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007 menjadi 34,96 juta orang (15,42 persen) pada Maret 2008, yang merupakan terendah dalam sejarah Indonesia. Di tengah membaiknya ekonomi domestik, pada tahun 2008 Indonesia dihadapkan kepada berbagai persoalan eksternal yang sedikit banyak mempengaruhi percepatan perbaikan perekonomian Indonesia. Gejolak *subprime mortgage* di Amerika Serikat telah membawa dampak kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, yang pada gilirannya membawa dampak kepada perlambatan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya Pemerintah harus merevisi target pertumbuhan ekonominya menjadi lebih rendah. Perlambatan situasi ekonomi dunia, juga diikuti oleh melonjaknya harga minyak dan harga pangan di pasar internasional. Kenaikan harga pangan dunia jelas memberi dampak kepada daya beli, terutama mereka yang miskin. Indonesia dihadapkan kepada kondisi kenaikan harga pangan dan minyak mentah pada saat yang bersamaan. Pilihan kebijakan menjadi semakin sulit.

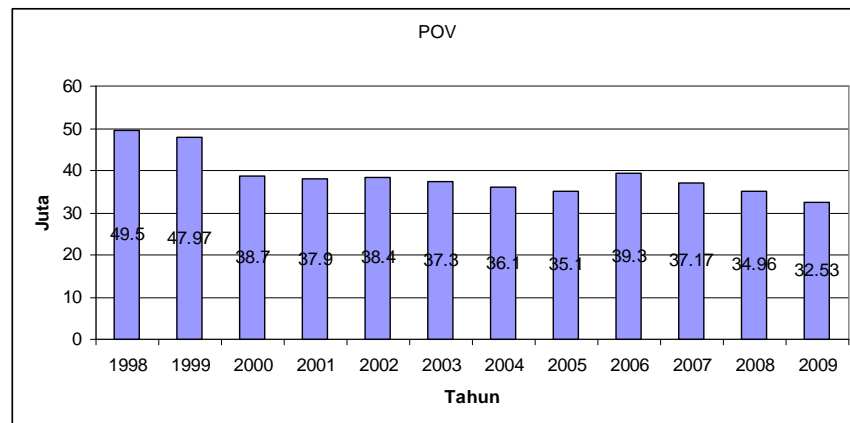
Menjelang akhir tahun 2009, perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut ditopang oleh meningkatnya optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global dan

domestik, serta terjaganya kestabilan ekonomi makro. Perbaikan perekonomian global telah berdampak positif pada perkembangan ekspor dan investasi. Sementara itu, stabilnya daya beli masyarakat serta terjaganya keyakinan masyarakat telah mendorong konsumsi tetap terjaga pada level yang cukup tinggi. Tetap tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan konsumsi Pemerintah yang masing-masing mencapai 4,8 persen dan 15,7 persen, serta membaiknya kinerja ekspor, meningkatkan optimisme pelaku usaha untuk meningkatkan investasi. Indikasi peningkatan investasi tercermin antara lain pada meningkatnya permintaan semen dan perbaikan pertumbuhan impor barang modal. Dengan perkembangan tersebut, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mencapai 4,5 persen.

Diskripsi perkembangan variabel adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (*Tabel 4.1*). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta (17,47 persen) pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta (23,43 persen) pada tahun 1999.



Gambar IV.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996–2009
 Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Survei Badan Pusat Staistik (BPS)

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008 dan Maret 2009

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang . Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu 63,47 persen.

Dari angka kemiskinan Maret 2008 menurut provinsi , terdapat sembilan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10

persen). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dua provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar pada Maret 2008 adalah Papua (37,08 persen) dan Papua Barat (35,12 persen).

b. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dalam mengantisipasi meningkatnya penduduk miskin akibat krisis ekonomi pemerintah telah melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Target dan sasaran program tersebut bervariasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dibagi ke dalam tiga program yaitu: (1) program penyelamatan (*Rescue*), (2) program penciptaan lapangan kerja dan (3) program pemberdayaan.

1) Program Penyelamatan (*Rescue*)

Program ini terdiri dari tiga kelompok besar yaitu:

a) Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)

Program Jaringan Pengaman Sosial meliputi tiga bidang utama yaitu: pangan, pendidikan, kesehatan dan sosial.

b) Bidang Pangan (Operasi Pasar Khusus/OPK Beras)

Program OPK beras diluncurkan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kemarau berkepanjangan (efek *El Nino*).

Program ini bersifat khusus karena penyalurannya tidak melalui pasar umum, melainkan langsung kepada penerima

manfaat. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2000. Realisasi RASKIN selama 2005 - 2009 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2 juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, RASKIN bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. RASKIN telah mengurangi permintaan beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta pada tahun 2009.

c) Bidang Pendidikan, Beasiswa dan DBO Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam bidang pendidikan bantuan diwujudkan melalui : *Pertama*, Beasiswa Program diluncurkan untuk membantu siswa dan sekolah yang terpuruk akibat krisis ekonomi. *Kedua*, Rehabilitasi SD/MI merupakan kegiatan yang berfokus pada penjagaan dan peningkatan kondisi gedung sekolah dari berbagai potensi kerusakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar serta mengancam keselamatan siswa jika bangunan sekolah roboh. Program ini dikategorikan sebagai program rutin ditahab anggaran 1998/1999 yang diberinama program rehabilitasi SD/MI sedangkan pada TA 1999/2000 berubah nama menjadi program DOP SD/MI.

d) Bidang Kesehatan dan Sosial

Krisis moneter menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan gizi masyarakat terutama bagi keluarga miskin. Tujuan umum dari program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi keluarga miskin. Target dan sasaran program adalah: (1) pelayanan kesehatan dasar kepada anggota keluarga miskin yaitu keluarga dengan kriteria pra sejahtera dan sejahtera I dan keluarga miskin lain yang ditetapkan oleh Tim Desa, (2) Pelayanan kesehatan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, (3) pelayanan perbaikan gizi pada ibu hamil yang kekurangan energi kalori (KEK), ibu nifas kekurangan energi kalori (KEK), bayi (6-11 bulan) dan anak (12-23 bulan).

e) Program JPS Bidang Sosial

Salah satu akibat dari krisis ekonomi adalah tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga banyak anak yang terpaksa harus meninggalkan orang tua dan rumahnya untuk menghidupi dirinya. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya peningkatan jumlah anak jalanan dan terlantar di kota-kota besar.

f) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Rendahnya status gizi dan kesehatan anak sekolah merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah.

Melalui perbaikan gizi dan kesehatan diharapkan terjadi peningkatan kesehatan fisik siswa sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar dan menjaga prestasi dalam rangka rangkaian tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

2) Program Reorientasi Subsidi BBM

- a) Program Modal Usaha Bergilir Bagi KSP/USP/LKM
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana (PPM-Prasarana)
- c) Program Penyaluran Dana Tunai (Cash Transfer) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
- d) Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE)
 - (1) Program layanan bidang kesehatan
 - (2) Program layanan bidang pendidikan
 - (3) Program subsidi angkutan umum
 - (4) Program penyediaan sarana air bersih perkotaan
 - (5) Program penyediaan dana bergulir lembaga keuangan mikro
 - (6) Program pemberdayaan masyarakat pesisir

3) Program Penciptaan Lapangan Kerja

- a) Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK)

Tujuan utama dari PDKMK adalah untuk menyediakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi tenaga kerja penganggur kurang terdidik di daerah perkotaan. Padat karya ini dilaksanakan dengan kriteri-kriteria seperti pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi. Untuk setiap proyek, maksimum 60 tenaga penganggur akibat krisis ekonomi dan dampak kekeringan yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan.

b) Proyek Penanggulangan Tenaga Kerja Terampil (P3T)

Sama halnya dengan proyek PDKMK, proyek P3T ditujukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui dua model proyek, yaitu: Lembaga Ekonomi Produktif (LEP) dan Wirausaha Baru (WU). Kedua model ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga mandiri, seperti lembaga-lembaga. Ekonomi produktif dan LSM memberikan bantuan kepada tenaga kerja penganggur terdidik (minimal SLTA) agar dapat kembali bekerja atau menjadi Wirausaha baru. Kedua model ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga mandiri, seperti lembaga-lembaga. Ekonomi produktif dan LSM memberikan bantuan kepada tenaga kerja penganggur terdidik (minimal SLTA) agar dapat kembali bekerja atau menjadi Wirausaha baru.

c) Program Padat Karya Perkotaan

Berbagai program penyelamatan krisis selama ini dinilai tidak responsive dalam melibatkan kaum perempuan. Kalaupun ada, jumlah perempuan yang terserap amat sedikit dan tidak dituangkan dalam aturan yang tersurat. Di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan merupakan kelompok yang paling terkena dampak krisis.

4) Program Pemberdayaan

a) Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE)

(PDM-DKE) merupakan program jangka pendek dan berorientasi pada penyelamatan (*rescue*), namun memiliki visi keberlanjutan yang harapannya mampu memberdayakan daerah dan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk (1) Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. (2) Menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana sosial ekonomi yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang/jasa yang diusahakan oleh rakyat, serta dibutuhkan oleh masyarakat. (3) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b) P3DT Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal

Salah satu program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah program bantuan modal dan bantuan supervisi (pendamping). Agar bantuan tersebut bisa terus berlangsung dan bisa dirasakan manfaatnya oleh perdesaan maka pemerintah membuat sebuah program baru untuk mendorong program-program IDT yang dilaksanakan sebelumnya.

c) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Lonjakan pengangguran dan peningkatan kemiskinan akibat krisis yang juga mendorong untuk memperluas pendekatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat kelembagaan di masyarakat agar upaya berikut dari penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

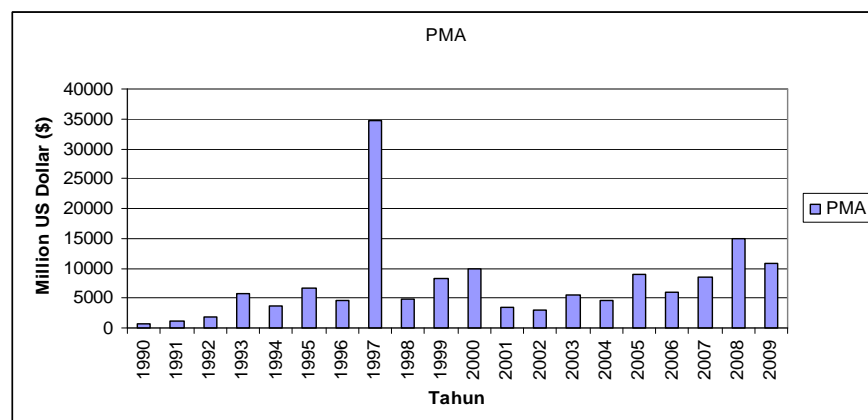
Penanaman modal asing (PMA) berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang. Di Indonesia, kondisi tingkat penanaman modal asing selama periode penelitian mengalami pasang surut. Awalnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 1960-1970 an masih sedikit. Hal ini karena pemerintah saat itu sangat membatasi hadirnya investor asing Indonesia. Selain itu reputasi Indonesia yang kurang baik di mata kalangan investor asing membuat mereka enggan untuk menanamkan

modalnya di Indonesia. Akan tetapi karena kehadiran investasi asing sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk menarik minat investor asing agar bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengupayakan terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi.

Sejak pertengahan tahun 1997, investasi asing di Indonesia mengalami penurunan sangat drastis, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi politik, lemahnya mata uang rupiah, dan perekonomian yang tidak pasti. Para pengusaha merasa tidak pasti tentang situasi politik dan ekonomi Indonesia. Tentu, hal ini berakibat pada arus PMA di Indonesia. Buruknya daya saing Indonesia dalam menarik PMA lebih nyata lagi jika dibandingkan dengan perkembangan PMA di negara-negara lain. Misalnya dalam kelompok ASEAN, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis ekonomi tahun 1998; walaupun nilai negatifnya cenderung mengecil sejak tahun 2000. Hal ini berkaitan dengan iklim politik yang semakin baik dibandingkan pada periode 1998-1999, yang memperkecil keraguan calon-calon investor untuk menanam modalnya di Indonesia.

Saat ini ketika kondisi Indonesia mulai stabil kembali, sangat diharapkan bagi masyarakat untuk menarik investor asing kembali meningkat. Kendati situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini sempat memanas yang ditandai dengan berbagai kerusuhan di berbagai daerah,

investasi asing yang masuk masih tetap mengalir. Ini adalah bukti bahwa tingkat iklim investasi Indonesia masih menarik, sebagai bukti Indonesia masih tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan para pengusaha asing masih tetap menaruh kepercayaan yang tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2008 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US\$ 14.871,4 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2006. Namun demikian, kegiatan investasi secara umum masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Investasi pada tahun 2009 mengalami penurunan yang drastis dari 11,86 persen menjadi 3,32 persen (*y-o-y*) akibat menurunnya kegiatan produksi terkait dengan melemahnya aktivitas global sebesar US\$ 10.815,2 juta. Perkembangan penanaman modal asing di Indonesia selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar IV.2 Perkembangan Realisasi PMA di Indonesia 1990 –2009

Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Survei BKPM

commit to user

3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Indonesia

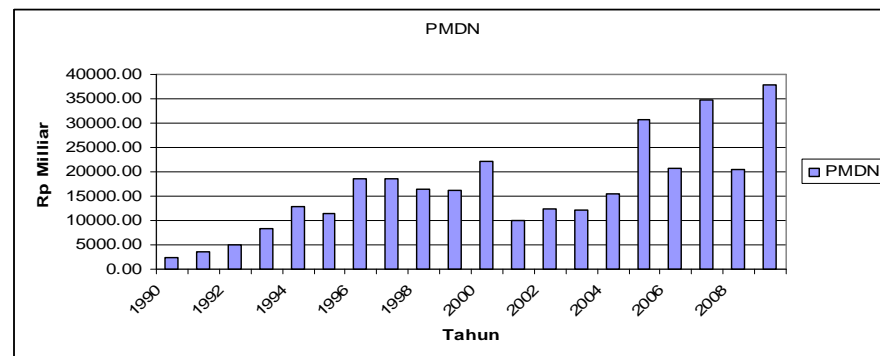
Perkembangan penanaman modal dalam negeri di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan strategi industrialisasi yang diterapkan di Indonesia. Pada masa perkembangan industri dalam negeri melalui strategi substitusi impor dapat diamati bahwa industri dalam negeri sangat dimanjakan dengan berbagai proteksi dari pemerintah. Adapun setelah diterapkan strategi promosi ekspor, kecenderungan adanya peningkatan investasi asing maupun domestik tampaknya tidak lagi dikarenakan adanya proteksi dan kuota impor. Hal ini dikarenakan setelah fase tersebut terlihat bahwa perdagangan internasional cenderung menuju sistem perdagangan bebas. Peningkatan penanaman modal dalam negeri di Indonesia seiring dengan perbaikan pelayanan yang tertuang dalam berbagai kebijakan deregulasi investasi. Peningkatan paling nyata terjadi sejak 1984 saat deregulasi diluncurkan pertama kali, kejutan terbesar dimulai tahun 1993, ketika deregulasi mulai menyentuh banyak sektor. Persetujuan penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan luar biasa pada tahun 1997 dimana mencapai 18.628,8 milyar rupiah.

Setelah krisis melanda Indonesia, kegiatan investasi dari tahun ke tahun semakin memburuk. Semakin memburuknya kegiatan investasi tidak terlepas dari masih tingginya resiko investasi yang memperburuk daya saing perekonomian seperti masalah perburuhan, implementasi

otonomi daerah yang terkait dengan investasi, ketidakpastian hukum serta kondisi keamanan yang diperburuk oleh tragedi bom bali.

Secara umum, indikasi memburuknya investasi dapat dilihat dari menurunnya jumlah persetujuan investasi domestik dan menurunnya impor barang modal dan bahan baku. Nilai persetujuan investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri tahun 2001 merosot 36,3% yakni dari Rp 22.038,0 milyar di tahun 2000 menjadi Rp 9.890,8 milyar pada tahun 2001. Penanaman modal mengalami peningkatan pada tahun 2002 yaitu Rp 9.890,8 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 12.500,0 milyar. Meskipun iklim investasi masih belum kondusif, potensi pembiayaan domestik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan investasi pada dasarnya masih tinggi.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2008 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp34.878,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 20.363,4 milyar. Investasi PMDN pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 37.799,8 milyar. Indikasi peningkatan investasi tercermin antara lain pada meningkatnya permintaan semen dan perbaikan pertumbuhan impor barang modal. Dengan perkembangan tersebut, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mencapai 4,5 persen.



Gambar IV.3 Perkembangan Realisasi PMDN di Indonesia tahun 1990–31 Desember 2009

Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Survei BKPM

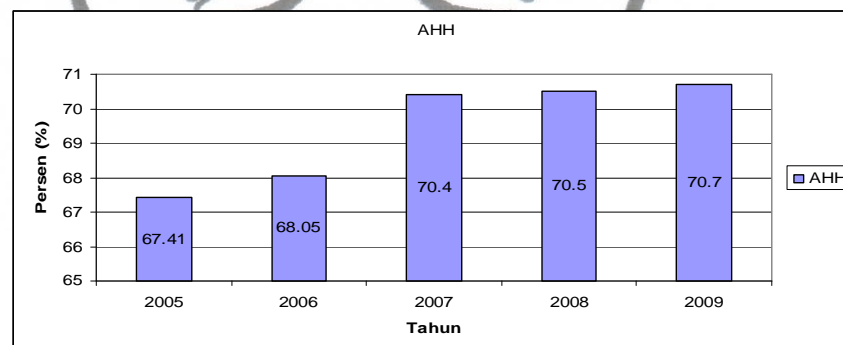
3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Indonesia

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk Tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan

menjelang tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun.

Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Gambar IV.5 Perkembangan Angka Harapan Hidup Indonesia Tahun 2005-2009

Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Survei BPS

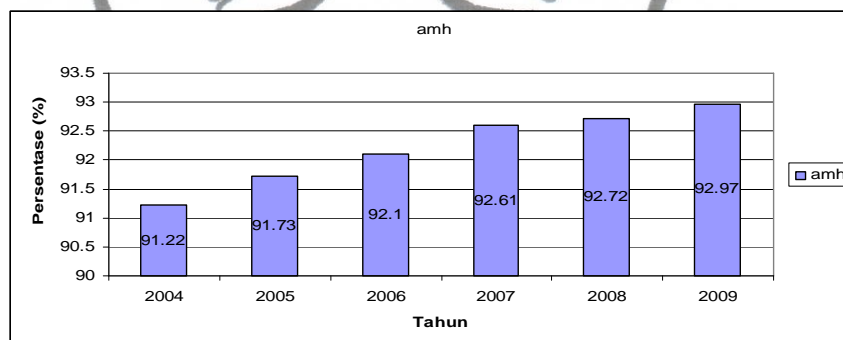
4. Perkembangan Angka Melek Huruf Indonesia

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun membutuhkan

intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan mampu mengakses lapangan pekerjaan. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar \$1 untuk pendidikan bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan produktivitas yang meningkat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di pedesaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan di banding penduduk perkotaan.

Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional, penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2009 berjumlah sekitar 8,3 juta orang (92.97%) dan sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah pedesaan seperti petani kecil, buruh, nelayan, serta kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Data di atas tentu membuat kita prihatin. Di era millennium ketiga ini ternyata angka buta huruf masih 8, 3 juta orang. Tetapi, kita akan lebih prihatin lagi dengan data minat baca di Indonesia. Berdasarkan studi lima tahunan yang dikeluarkan oleh Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2006, yang melibatkan siswa sekolah dasar (SD), hanya menempatkan Indonesia pada posisi 36 dari 40 negara yang dijadikan sampel penelitian.

Posisi Indonesia itu lebih baik dari Qatar, Kuwait, Maroko, dan Afrika Selatan. Sementara itu, berdasarkan penelitian Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP untuk melek huruf pada 2002 menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 173 negara. Posisi tersebut kemudian turun satu tingkat menjadi 111 di tahun 2009. Berdasarkan data CSM, yang lebih menyedihkan lagi perbandingan jumlah buku yang dibaca siswa SMA di 13 negara, termasuk Indonesia. Di Amerika Serikat, jumlah buku yang wajib dibaca sebanyak 32 judul buku, Belanda 30 buku, Prancis 30 buku, Jepang 22 buku, Swiss 15 buku, Kanada 13 buku, Rusia 12 buku, Brunei 7 buku, Singapura 6 buku, Thailand 5 buku, dan Indonesia 0 buku.



Gambar IV.6 Angka Melek Huruf Indonesia Tahun 2004-2009

Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Survei BPS

5. Perkembangan Kosumsi Makanan Indonesia

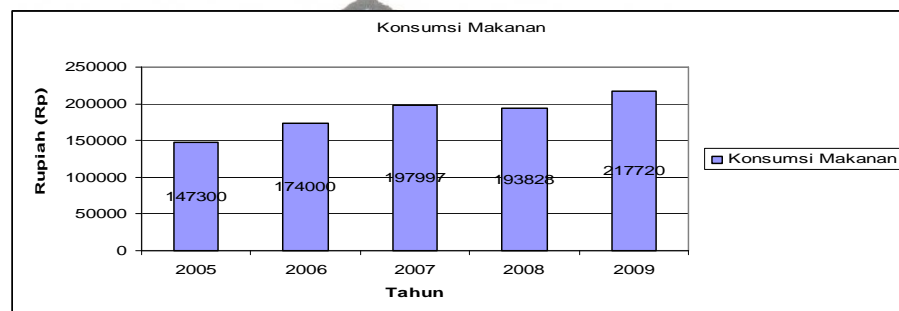
Konsumsi pangan termasuk konsumsi energi dan protein sangat di pengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pangan dan gizi. Tingkat kosumsi energi dan protein masyarakat berbeda antar kelompok pendapatan dan terdapat kecenderungan semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.

Salah satu prasyarat keberhasilan program program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan.

Dalam kasus Indonesia, secara umum memakai standar pengukuran kemiskinan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuaian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Sayogyo dan Sam F.Poli dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 1994).

Sebaliknya Bank Dunia menggunakan standard mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu untuk dekade 1980, standar pengeluaran untuk makanan adalah 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS untuk per kapita per tahun (berdasarkan kurs dasar dollar 126 terhadap rupiah pada tahun 1971). BPS dalam mengadopsi ukuran dari Bank Dunia melakukan

penyesuaian dengan pola dasar konsumsi pada tahun 1971, dan kemudian disesuaikan dengan kenaikan harga (inflasi) dari bahan makanan pokok. Penyebaran kemiskinan, karakteristik demografis, karakteristik pekerjaan, sumber penghasilan, dan pola konsumsi penduduk miskin dan kaya, terlihat dalam data.



Gambar IV.7 Grafik Perkembangan Konsumsi Makanan Indonesia Tahun 2004-2009

Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Survei BPS

6. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia

Perkembangan pengeluaran pemerintah selama periode penelitian dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan mengalami kenaikan. Pengeluaran pemerintah di tingkat nasional secara riil menunjukkan peningkatan yang mantap sejak 1999 namun masih tetap stabil terhadap keadaan ekonomi secara keseluruhan. Selama periode 1999-2006, pengeluaran pemerintah berjumlah sebesar rata-rata 20 persen dari PDB. Secara nominal, pengeluaran pemerintah meningkat dari Rp 198 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp 536 triliun pada tahun 2005 dan diperkirakan meningkat lebih jauh menjadi Rp 698 triliun dan Rp 794 triliun masing-masing untuk tahun 2006 dan tahun 2007, (APBN-P/APBN). Secara riil (harga konstan tahun 2000), pengeluaran di tingkat

nasional meningkat sebesar 93 persen dari Rp 206 triliun (1999) menjadi Rp 397 triliun (2006). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mereduksi kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer.

Pada tahun 1999 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi, dimana pola sentralisasi pada semua aspek membawa dampak tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang.

Besarnya peran pemerintah pusat dari sisi keuangan tergambar dalam anggaran daerah. Fenomena yang terdapat pada struktur anggaran daerah pada rata-rata Kabupaten /kota di Indonesia adalah tingginya proporsi sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat (dana alokasi) terhadap Total Penerimaan Daerah yaitu sebesar 68,32% pada tahun 1997/1998, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu 71,09% tahun 1998/1999 dan 75,44% pada tahun 1999/2000. Besarnya proporsi tersebut mengakibatkan jumlah serta pola pengalokasian dari

sumbangan dan bantuan pemerintah pusat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah. Perkembangan pengeluaran pemerintah selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar IV.8 Grafik Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2000-2009

Sumber: Hasil olahan Excel 2003 data Direktorat Jendral Keuangan

B. Analisis Data Dan Pembahasan

1. Diskripsi Data

Penelitian ini didesain untuk mengetahui pengaruh PMA, PMDN, angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AHM), konsumsi makanan (KM) dan pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2009.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*). Dengan menggunakan pendekatan semua koefisien konstan terhadap waktu dan individu yang menggunakan data sekunder (*Pooled data*). Data analisis dalam bentuk data tahunan per provinsi di Indonesia dari tahun 2005-2009. Seluruh data yang digunakan akan diolah dan

dianalisis menggunakan program SPSS versi 16.0. analisis data yang akan dikemukakan merupakan hasil analisis secara statistik dan ekonomi. Adapun variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan digunakan dalam penelitian ini merupakan kemiskinan yang diperoleh dari data kemiskinan perkotaan dan pedesaan setiap propinsi di Indonesia. Data Kemiskinan ini berupa data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- b. Penanaman Modal Asing (PMA) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMA yang disetujui pemerintah berdasarkan lokasi. Data penanaman modal asing berupa data tahunan setiap propinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Badan Kooedinasi Penanaman Modal.
- c. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMDN yang disetujui pemerintah berdasarkan lokasi. Data penanaman modal Dalam Negeri berupa data tahunan setiap propinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Badan Kooedinasi Penanaman Modal.
- d. Angka harapan hidup (AHH) yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka harapan hidup penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Data angka harapan hidup berupa data tahunan setiap propinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional terbitan Badan Pusat Statistik.

- e. Angka melek huruf (AMH) yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka melek huruf penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Data Angka Melek Huruf berupa data tahunan setiap propinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Indikator kesejahteraan rakyat terbitan Badan Pusat Statistik.
- f. Kondumsi makanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondumsi makanan penduduk Indonesia berdasarkan Pengeluaran per Kapita per bulan menurut provinsi. Data kondumsi makanan berupa data tahunan setiap propinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi terbitan Badan Pusat Statistik.
- g. Pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Data pengeluaran pemerintah berupa data tahunan setiap propinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari data Laporan Perda APBD 2006-2009 terbitan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Variabel independen dari penelitian ini adalah PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kemiskinan nasional di Indonesia.

2. Deskripsi Statistik

Dengan melakukan perhitungan statistik deskriptif, maka dapat diketahui gambaran tentang data Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan pada tahun 2005 hingga tahun 2009. Deskripsi statistik semua variabel yang digunakan dalam model disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
Descriptive Statistics

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
PMA	0,00	9927,80	301,30	1040,42
PMDN	0,00	11347,90	773,23	1617,60
AHH	60,50	76,00	69,65	2,74
AMH	70,29	99,45	92,55	5,99
KM	41,10	317,80	191,53	48,09
PP	250929,06	130.000.000	3416736	10596502,96
POV	3,61	50,40	16,73	8,42

Sumber: Data diolah 2010

Pada tabel IV.2 diatas diketahui nilai rata-rata PMA sebesar 301,30, dengan nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 9927,80 dengan standar deviasi sebesar 1040,42. Nilai rata-rata PMDN sebesar 773,23, dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 11347,90 dengan standar deviasi sebesar 1617,60. Nilai rata-rata JP sebesar 7089,99, dengan nilai minimum sebesar 9,00 dan nilai maksimum sebesar 41501,50 dengan standar deviasi sebesar 10132,16. Nilai rata-rata AHH sebesar 69,65, dengan nilai minimum sebesar 60,50 dan nilai maksimum sebesar 76,00 dengan standar deviasi sebesar 2,74.

Nilai rata-rata AMH sebesar 92,55, dengan nilai minimum sebesar 70,29 dan nilai maksimum sebesar 99,45 dengan standar deviasi sebesar 5,99. Nilai rata-rata KM sebesar 191,53, dengan nilai minimum sebesar 41,10 dan nilai maksimum sebesar 317,80 dengan standar deviasi sebesar 48,09. Nilai rata-rata PP sebesar 3416736, dengan nilai minimum sebesar 250929,06 dan nilai maksimum sebesar 130.000.000 dengan standar deviasi sebesar 10.596.502,96. Nilai rata-rata variabel POV sebesar 16,73 dengan nilai minimum sebesar 3,61 dan nilai maksimum sebesar 50,40 dengan standar deviasi sebesar 8,42.

3. Hasil dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Panel data yaitu gabungan antara data *timeseries* dan *cross section*. Data panel disebut juga pooled data (*pooling time series* dan *cross section*), model tersebut menggabungkan observasi lintas sektoral dan data runtun waktu sehingga jumlah observasi meningkat-meningkatkan jumlah kebebasan dan mengurangi jumlah kolinieritas antara variabel penjelas dan kemudian akan memperbaiki efisiensi estimasi ekonometrika. Verbeek (2000: 310) mengemukakan bahwa keuntungan regresi dengan menggunakan data panel dibandingkan dengan data runrun waktu atau lintas sektoral adalah kemampuan regresi data panel dalam mengidentifikaso parameter-parameter regresi secara pasti dengan tanpa membutuhkan asumsi restriksi atau kendala.

Dalam menganalisis pengaruh dari PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia digunakan analisis regresi Berganda. Model regresinya adalah sebagai berikut

$$POVi = \beta_0 + \beta_1 PMA_{1it} + \beta_2 PMDN_{2it} + \beta_4 AHH_{3it} + \beta_5 AMH_{4it} + \beta_6 KM_{5it} + \beta_7 PP_{6it} + e_i \dots (1)$$

Dimana:

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

$POVi$: Jumlah Persentase Penduduk Miskin (Pddk Mskn)

PMA_{1it} : Penanaman Modal Asing (PMA)

$PMDN_{2it}$: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

AHH_{3it} : Angka Harapan Hidup (AHH)

AMH_{4it} : Persentase Angka Melek Huruf (AMH)

KM_{5it} : Persentase Konsumsi Makanan (KM)

PP_{6it} : Pengeluaran Pemerintah (PP)

β_0 : Intersept

t : waktu

Hasil olah data dengan menggunakan program SPSS versi 15.00 diperoleh hasil seperti berikut :

$$POV = 85.251 - 0,002PMA + 0.000PMDN - 0,288 AHH - 0,433AMH - 0,047KM + 3.142E-7PP$$

Tabel IV.2
Hasil Estimasi Linier Berganda

Variabel	Koef. Regresi	Std. Error	t-hitung	Sign
Konstanta	85.251	15.561		
PMA	-0.002	0.000	-5.883	0.000
PMDN	0.000	0.000	-0.745	0.458
AHH	-0.288	0.205	-1.406	0.162
AMH	-0.433	0.082	-5.256	0.000
KM	-0.047	0.009	-5.413	0.000
PP	3.142E-7	0.000	6.573	0.000
R	0,724 ^a			
R-Squared	0,524			
Adj. R-Squared	0,506			
F-Hitung	29.042			
Probabilitas F	0,000			

Sumber: Data diolah, 2010

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 85.251 menunjukkan bahwa jika faktor PMA, PMDN, AHH, AMH, KM dan PP konstan maka POV sebesar 85.251%.
- Koefisien regresi PMA (b_1) bernilai negatif yaitu -0,002, hal ini menunjukkan bahwa PMA mempunyai pengaruh negatif terhadap POV, artinya setiap ada kenaikan PMA sebesar \$ 1 juta US dollar., maka POV akan turun sebesar 0,002%, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Koefisien regresi PMDN (b_2) bernilai positif yaitu 0,000, hal ini menunjukkan bahwa PMDN mempunyai pengaruh positif terhadap

POV, artinya setiap ada kenaikan PMDN sebesar Rp 1 miliar mengakibatkan POV akan naik sebesar 0,0000%, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

- d. Koefisien regresi AHH (b_3) bernilai negatif yaitu -0,231, hal ini menunjukkan bahwa AHH mempunyai pengaruh negatif terhadap POV, artinya jika AHH naik 1% angka harapan hidup seseorang akan mengakibatkan POV menurun sebesar 0,231%, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- e. Koefisien regresi AMH (b_4) bernilai negatif yaitu -0,231, hal ini menunjukkan bahwa AMH mempunyai pengaruh negatif terhadap POV, artinya semakin besar AMH sebanyak 1% orang yang bisa baca dan tulis akan mengakibatkan POV menurun sebesar 0,231%, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- f. Koefisien regresi KM (b_5) bernilai negatif yaitu -0,109, hal ini menunjukkan bahwa KM mempunyai pengaruh negatif terhadap POV, artinya semakin besar KM sebanyak 1 orang dalam pemenuhan makanan akan mengakibatkan POV menurun sebesar 0,109%, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- g. Koefisien regresi PP (b_6) bernilai positif yaitu 3.142E-7, hal ini menunjukkan bahwa PP mempunyai pengaruh positif terhadap POV, artinya semakin besar PP sebanyak Rp 1 juta akan mengakibatkan POV meningkat sebesar 3.142E-7%, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4. Uji Asumsi Klasik

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi *Pooled data*.

Agar hasil regresi secara bersama-sama sehingga harus terpenuhi asumsi klasik, yaitu *Normalitas*, *autokorelasi*, *multikolinieritas*, *heteroskedastisitas*.

a) Uji *Multikolinieritas*

Multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier diantara variabel independen yang digunakan dalam model. Metode untuk menguji adanya *multikolinieritas* dilihat dari nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF variabel independen dibawah nilai 10 dan *tolerance value* diatas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* dalam model regresi sehingga model tersebut reliable sebagai dasar analisis. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Hasil Uji *Multikolinieritas*

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
PMA	0.850	1.176	Bebas <i>Multikolinieritas</i>
PMDN	0.828	1.208	Bebas <i>Multikolinieritas</i>
AHH	0.697	1.435	Bebas <i>Multikolinieritas</i>
AMH	0.910	1.099	Bebas <i>Multikolinieritas</i>
KM	0.659	1.517	Bebas <i>Multikolinieritas</i>
PP	0.897	1.115	Bebas <i>Multikolinieritas</i>

Sumber: Data diolah (lampiran 4)

b) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya *autokorelasi*, dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson (DW)*.

Tabel IV.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	DW	dl	Du	4-du	Keterangan
Regresi Model	2.077	1,697	1,841	2,159	Bebas auto

Sumber : data diolah (lampiran 3)

Dengan nilai *DW* sebesar 1,861 dimana angka tersebut berada diantara $du - 4-du$ ($1,841 \leq 2,077 \leq 2,159$), sehingga dapat disimpulkan bebas autokorelasi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam penelitian ini menggunakan uji *Park* yaitu dengan cara meregresikan nilai kuadrat residual terhadap variabel independen. Ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Hasil pengujian *heteroskedastisitas* dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah ini.

Tabel IV.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t hitung	Prob	Kesimpulan
PMA	0.627	0.532	Bebas Heteroskedastisitas
PMDN	1.126	0.264	Bebas Heteroskedastisitas
AHH	-0.906	0.368	Bebas Heteroskedastisitas
AMH	-0.762	0.449	Bebas Heteroskedastisitas
KM	-0.349	0.728	Bebas Heteroskedastisitas
PP	1.319	0.191	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil pengolahan data

Pada tabel IV.6 diketahui bahwa probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji asumsi klasik (*normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas*) diperoleh bahwa dalam model yang digunakan sudah tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik, artinya model regresi pada penelitian dapat digunakan sebagai dasar analisis.

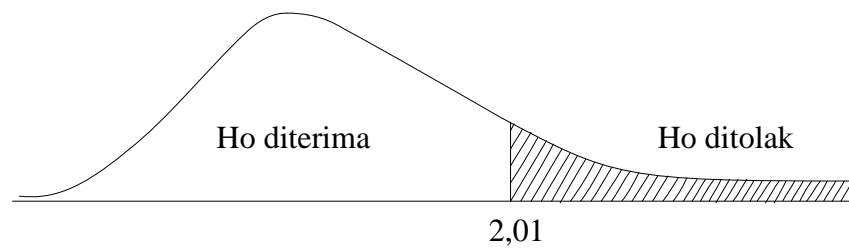
2. Pengujian Statistik

Uji statistik ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis nol. Ada 3 uji Statistik yang dilakukan yaitu:

a) Uji F

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut:

commit to user

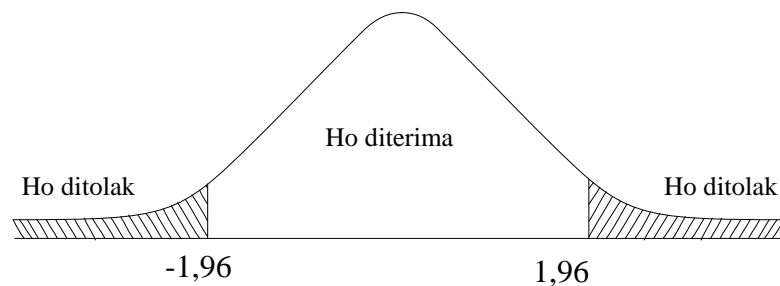


- Apabila nilai $F_{hitung} < 2,01$, maka H_0 diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
- Apabila nilai $F_{hitung} > 2,01$, maka H_0 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar $29.042 > F_{tabel} (2,01)$ dengan probabilitas signifikansinya sebesar 0.000000 yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angkam muruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi Kemiskinan.

b) Uji Signifikasi Parameter Individual (t)

Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:



- Apabila nilai $-1,96 < t \text{ hitung} < 1,96$ maka H_0 diterima. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
- Apabila nilai $t \text{ hitung} > 1,96$ atau $t \text{ hitung} < -1,96$, maka H_0 ditolak. Artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel IV.7
Hasil uji t

Variabel	t-hitung	Sign	t-tabel	Kesimpulan
PMA	-5.883	0.000	1,960	Signifikan
PMDN	-0.745	0.458	1,960	Tidak Signifikan
AHH	-1.406	0.162	1,960	Tidak Signifikan
AMH	-5.256	0.000	1,960	Signifikan
KM	-5.413	0.000	1,960	Signifikan
PP	6.573	0.000	1,960	Signifikan

Sumber : Data diolah (lampiran 2)

(1) PMA (X_{1i})

Hasil pengolahan data diperoleh t hitung dari variabel PMA sebesar 5,883 atau $5,883 > 1,960$ dan nilai signifikansi PMA yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PMA secara individu

commit to user

berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan pada derajat signifikansi 5%.

(2) PMDN (X_{2i})

Hasil pengolahan data diperoleh t hitung dari variabel PMDN sebesar -0,745 atau $0,745 < 1,960$ dan nilai signifikansi PMDN yaitu sebesar 0,458 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PMDN secara individu tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan.

(3) Angka Harapan Hidup (X_{3i})

Hasil pengolahan data diperoleh t hitung dari variabel Angka Harapan Hidup sebesar -1,406 atau $1,406 < 1,960$ dan nilai signifikansi angka harapan hidup yaitu sebesar 0,126 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel angka harapan hidup secara individu tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan pada derajat signifikansi 5%.

(4) Angka Melek Huruf (X_{4i})

Hasil pengolahan data diperoleh t hitung dari variabel Angka Melek Huruf sebesar -5,256 atau $5,256 < 1,960$ dan nilai signifikansi Angka Melek Huruf yaitu sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Angka Melek Huruf secara individu berpengaruh secara statistik terhadap Persentase Penduduk Miskin pada derajat signifikansi 5%.

(5) Konsumsi Makanan (X_{5i})

Hasil pengolahan data diperoleh t hitung dari variabel konsumsi makanan sebesar $-5,413$ atau $5,413 > 1,960$ dan nilai signifikansi konsumsi makanan yaitu sebesar $0,000$ lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konsumsi makanan secara individu berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan pada derajat signifikansi 5% .

(6) Pengeluaran Pemerintah (X_{6i})

Hasil pengolahan data diperoleh t hitung dari variabel pengeluaran pemerintah sebesar $6,573$ atau $6,573 > 1,960$ dan nilai signifikansi pengeluaran pemerintah yaitu sebesar $0,000$ lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah secara individu berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan.

c) **Koefisien Determinasi (R^2)**

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 dengan bantuan program SPSS dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi (adjusted R^2) sebesar $0,506$. Hal ini berarti $50,6\%$ variasi perubahan POV dijelaskan oleh variasi PMA, PMDN, AHH, AMH, KM dan PP. Sementara sisanya sebesar $49,4\%$ diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi.

C. Interpretasi Hasil Secara Ekonomi

1. Nilai Konstanta terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi persamaan linier berganda (Tabel IV.2) menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 85.251. Hal itu berarti, jika semua variabel independen (PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah) konstan, maka perubahan tingkat kemiskinan bertambah sebesar 85.251%.

2. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel PMA adalah sebesar -0,002. Hal ini berarti bahwa apabila nilai koefisien regresi variabel lain konstan maka kenaikan PMA sebesar setiap ada kenaikan PMA sebesar \$ 1 juta US dollar, maka POV akan turun sebesar 0,002%. Nilai t-hitung variabel Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 5,883 lebih besar dari 1,960 dan nilai signifikansi Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sehingga kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) menurunkan Kemiskinan.

Secara teoritis, Penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang ekonomi makro,

maka penanaman modal atau investasi adalah pengeluaran yang menambah modal baru bagi masyarakat. Modal baru tersebut dapat berupa penambahan sejumlah uang yang diinvestasikan maupun penambahan pada faktor-faktor produksi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang-barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru, kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran (karena terciptanya lapangan kerja yang baru) dan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dimana diharapkan akan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Hasil analisis dalam penelitian ini mendukung pernyataan di atas, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh negatif menunjukkan

commit to user

bahwa semakin besar PMA akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel PMDN mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hubungan yang positif ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel PMDN mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. Nilai *t*-hitung variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar -0,745 lebih kecil dari 1,960 dan nilai signifikansi Penanaman Dalam Negeri (PMDN) yaitu sebesar 0,458 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sehingga kenaikan maupun penurunan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak mempengaruhi Kemiskinan.

Secara teoritis, PMDN adalah penggolongan modal, kekayaan masyarakat Indonesia baik perorangan atau badan hukum termasuk di dalamnya benda bergerak ataupun benda tak bergerak bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Pembangunan suatu bangsa memerlukan dana untuk melaksanakan investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam pelaksanaannya investasi berlandaskan pada kemampuan sendiri, disamping memanfaatkan sumber-sumberlainnya

sebagai pendukung. Modal investasi dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Tidak signifikannya PMDN dapat disebabkan investasi yang dilakukan kurang bersifat produktif yang melibatkan sedikit tenaga kerja, sehingga kurang mendorong atau menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk.

4. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hubungan yang negatif ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel angka harapan hidup mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan.

Nilai t hitung variabel angka harapan hidup sebesar $-1,406$ lebih kecil dari $1,960$ dan nilai signifikansi angka harapan hidup yaitu sebesar $0,126$ lebih besar dari taraf signifikansi yaitu $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini berarti apabila variabel independen lain konstan, maka setiap perubahan yang terjadi pada variabel Angka Harapan Hidup sebesar satu persen tidak akan mempengaruhi kemiskinan.

Secara teoritis, keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan nasional. Tidak signifikannya angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan nasional disebabkan angka harapan hidup di Indonesia masih rendah, sehingga perlu diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial.

5. Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel angka melek bernilai negatif yaitu -0,231, hal ini menunjukkan bahwa AMH mempunyai pengaruh negatif terhadap POV, artinya semakin besar AMH sebanyak 1% orang yang bisa baca dan tulis akan mengakibatkan POV menurun sebesar 0,231%, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t hitung dari variabel angka melek huruf sebesar -5,256 atau $5,256 < 1,960$ dan nilai signifikansi Angka Melek Huruf yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konsumsi makanan secara individu berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan.

Secara teoritis, Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angka melek hurup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan nasional, hal ini dapat diartikan dengan semakin tingginya angka melek hurup masyarakat Indonesia akan semakin meningkatkan kemampuan untuk mengetahui informasi yang berguna bagi kehidupannya, sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraanya.

6. Pengaruh Konsumsi Makanan terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel konsumsi makanan negatif yaitu $-0,109$, hal ini menunjukkan bahwa KM mempunyai pengaruh negatif terhadap POV, artinya semakin besar KM sebanyak 1 persen dalam pemenuhan makanan akan mengakibatkan POV menurun sebesar $0,109\%$, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t hitung dari variabel konsumsi makanan sebesar $-5,413$ atau $5,413 > 1,960$ dan nilai signifikansi konsumsi makanan yaitu sebesar $0,000$ lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konsumsi makanan secara individu berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan.

Secara teoritis, Pengeluaran/konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga, merupakan salah satu indikator untuk melihat

kemiskinan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rumahtangga miskin akan cenderung mempunyai proporsi pengeluaran makanan yang lebih besar dibandingkan rumahtangga kaya. Rumahtangga miskin, tenaga dan pikiran kesehariannya hanya seputar bagaimana bisa makan yang cukup. Beda sekali dengan rumahtangga kaya yang ternyata masih mempunyai pilihan banyak untuk kehidupan, selain pengeluaran makanan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan nasional, pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran untuk makanan akan semakin mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, hal ini dapat disebabkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengeluarkan uang untuk makan akan semakin menumbuhkan usaha di bidang kuliner, sehingga menciptakan kesempatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja, hal ini berarti dapat mengurangi penduduk yang miskin di Indonesia.

7. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah adalah sebesar positif 3.142E-7. Hal ini berarti bahwa setiap ada kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1 juta akan mengakibatkan POV meningkat sebesar 3.142E-7%, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t-hitung variabel pengeluaran pemerintah 6,573 atau $6,573 > 1,960$ dan nilai signifikansi pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah secara individu berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan.

Secara teoritis, Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran mengatakan bahwa $Y=C+I+G+X-M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel diruaskanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditures*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamatinya dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakannya tersebut, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena dari kebijakan tersebut. Pengeluaran yang semakin besar dengan tujuan semata-mata hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan pula harus diperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan terpekerjakan atau meningkatkan pendapatannya. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Indonesia, artinya semakin besar

pengeluaran pemerintah justru akan semakin meningkatkan kemiskinan di Indonesia, hal ini dapat disebabkan karena pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu secara signifikan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk atau pengeluaran yang dilakukan pemerintah hanya semata-mata untuk mendapatkan pendapatan nasional.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dari kesimpulan yang ada, diberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kesimpulan pada penelitian meliputi diskripsi dari variabel yang diteliti dan hasil estimasi dari model analisis.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia tahun 2005-2009, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemiskinan di Indonesia selama periode penelitian dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul atas ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (*Tabel IV.1*). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi,

yaitu dari 34,01 juta (17,47 persen) pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta (23,43 persen) pada tahun 1999. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen).

2. Berdasarkan hasil uji F atau uji secara bersama-sama, semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti bahwa variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah secara bersama dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2009.
3. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pemilihan variabel sudah tepat, karena R^2 yang dihasilkannya 0,506 hampir mencapai angka 1. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variasi dari variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PMA, PMDN, angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi makanan dan pengeluaran pemerintah.
4. Pada uji t variabel PMA menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel PMDN berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel konsumsi makanan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

5. Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan model regresi berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2005-2009, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel PMA mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

b. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel PMDN mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

c. Pengaruh angka harapan hidup terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel angka Harapan hidup mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan

d. Pengaruh angka melek huruf terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

e. Pengaruh konsumsi makanan terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel konsumsi makanan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

f. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan diatas, sehingga saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) hendaknya Pemerintah membuat undang-undang baru tentang Penanaman Modal Asing sehingga lebih banyak investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Melihat begitu besarnya pengaruh angka melek huruf (AMH) dalam hal penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional maka sudah sepantasnya Pemerintah melakukan usaha atau langkah-langkah guna peningkatan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika sekarang pemerintah menggerakkan program wajib belajar 9 tahun maka sudah seharusnya pemerintah meningkatkan upaya sekolah gratis wajib belajar 12 tahun bagi anak-

anak yang kurang mampu sehingga masalah buta huruf di Indonesia cepat terselesaikan.

3. Melihat begitu besarnya pengaruh Konsumsi Makanan dalam hal penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional maka sudah sepantasnya Pemerintah melakukan usaha atau langkah-langkah guna peningkatan konsumsi makanan terhadap penduduk Indonesia seperti lebih meningkatkan pasokan kebutuhan pokok terutama makanan agar tidak terjadi lonjakan harga sembako di masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi.
4. Melihat begitu besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal penurunan kemiskinan nasional maka seharusnya pemerintah lebih selektif dalam pengeluaran dana untuk membantu masyarakat miskin sehingga bantuan tidak jatuh ditangan orang yang tidak tepat dan pengeluaran pemerintah dapat terealisasi secara merata.